

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARBARU 2021 - 2026



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas , fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	50
2.4 Tantangan dan Peluang Satpol PP Kota Banjarbaru terhadap ketertiban	60

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	62
3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Daerah	63
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Satpol PP Provinsi	67
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	75
3.5 Penentuan Isu- isu Strategis	80

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	84
--	----

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang,tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.....	87
--	----

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN...90

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....99

BAB VIII PENUTUP.....108

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan hidayahnya jua lah penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru Tahun 2021 – 2026 telah terselesaikan sesuai dengan rencana.

Renstra merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru periode Tahun 2021 -2026 yang wajib disusun oleh semua SKPD, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat dari pemerintah Kota Banjarbaru.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) ke depan. Renstra ini juga akan dijadikan sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya, yang diimplementasi ke dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada tatanan evaluasi pencapaian target – target output dan outcome.

Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah,tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun rancangan akhir rencana strategis satuan kerja perangkat daerah.

Dengan terselesaikannya dokumen renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru Tahun 2021 - 2026 kami mengucapkan terimakasih

kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunannya. Demikian dokumen ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Banjarbaru**

**H. MARHAIN RAHMAN, S.Sos, M.AP
NIP. 19680716 199010 1 001**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat dengan Renstra merupakan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru periode tahun 2021 – 2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjarbaru. Renstra ini disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta berdasarkan tugas pokok Satpol PP sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 255 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja mengemban peran strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan dan memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Banjarbaru, serta menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan.

Disamping itu Renstra Satpol PP juga merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dengan standar pelayanan minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru memuat tujuan dan sasaran program kegiatan serta dukungan alokasi anggaran dalam periode 5 tahun. Dokumen perencanaan utama ini dipastikan akan dijadikan sebagai pedoman pada setiap unsur organisasi Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok pada program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi sebagai kelanjutan dari capaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021 - 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru , serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Kentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 158) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1619) ;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) ;

14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
16. Perwali Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Kerja, Tgas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru;
17. Perwali Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja, Pokok dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Pada satuan polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Walikota Banjarbaru terpilih yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan Satpol PP selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Walikota.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Menerjemahkan visi misi Walikota Banjarbaru terpilih ke dalam tujuan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang RPJMD periode 2021-2026 ;
2. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksana program dan kegiatan

disertai sasaran dan fokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan ;

3. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru Tahun 2021 – 2026 disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas pokok, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru adalah sebagaimana disebutkan didalam peraturan perundangundangan sebagai berikut :

TUGAS POKOK :

1. Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah *“Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”*
2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 *“Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas memelihara menegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat serta perlindungan masyarakat”.*
3. Pasal 3 Peraturan Walikota Banjarbaru No. 45 Tahun 2013 *“Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru mempunyai Tugas Pokok Menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan ketentrman masyarakat serta perlindungan masyarakat”.*

FUNGSI :

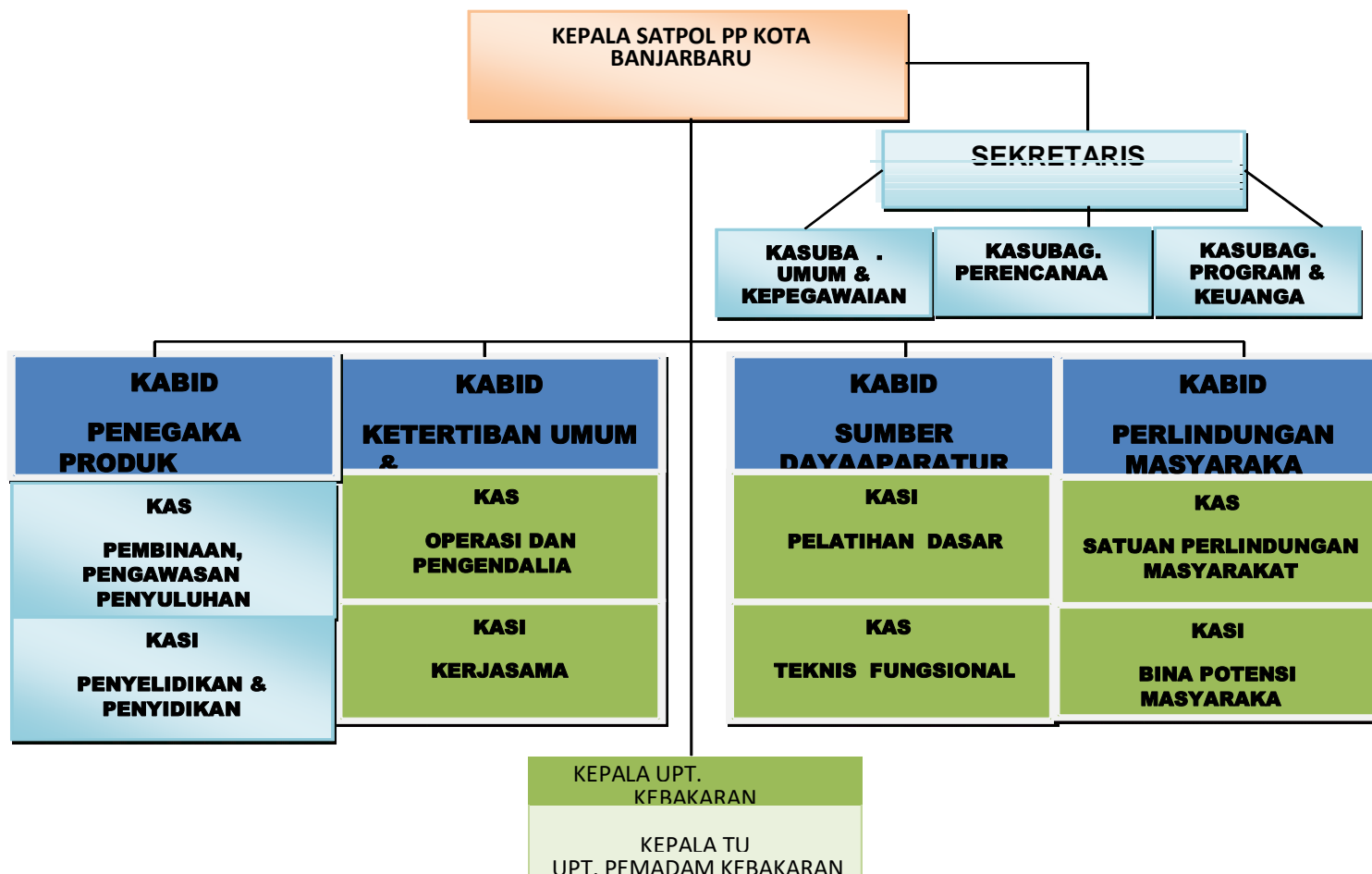
1. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Satpol PP mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda penelenggarakan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat serta perlindungan

- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah
 - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
 - e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan atau aparatur lainnya;
 - f. Pengawasan terhadap masyarakat , aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah/ atau aparatur lainnya;
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberi oleh Kepala Daerah”
2. Pasal 4 Peraturan Walikota Banjarbaru No. 45 Tahun 2013
“Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Fungsi :
- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan Peraturan Walikota
 - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
 - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan atau aparatur lainnya;

- f. Pengawasan terhadap masyarakat , aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah/ atau aparatur lainnya;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
- h. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota”

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARBARU

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru :



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.1 Sumber Daya Manusia

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru memiliki sumber daya Manusia Pegawai Negeri Sipil sebanyak 61 orang, dan Tenaga Kontrak sebanyak 80 Orang (Per 01 Desember 2021).

Sesuai instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi Pemerintah yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender bertujuan agar perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender terselenggara dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mendukung itu maka SKPD kami melakukan data terpilah dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru berdasarkan Golongan Pangkat adalah sebagai berikut :

NO	BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN		L	P
1	Pembina Utama Muda	IV c	1	
2	Pembina Tk. I	IV b	3	
3	Pembina	IV a	2	
4	Penata Tk. I	III d	4	2
5	Penata	III c	12	1
6	Penata Muda Tk. I	III b	1	1
7	Penata Muda	III a	4	1
8	Pengatur Tk. I	II d	18	
9	Pengatur	II c	7	
10	Pengatur Muda Tk. I	II b	4	
	Jumlah		56	5

NO	BERDASARKAN JENIS KELAMIN		
1.	Laki-laki	56	Orang
2.	Perempuan	5	Orang
	Jumlah	61	Orang

NO	NAMA	PANGKAT/ (GOL/RUA NG)	JABATAN	PEND IDIKAN	L	P
1	H. Marhain Rahman, S.Sos. M.AP	Pembina Utama Muda (IV.c)	Kasat POL PP	S - 2	L	
2	Subhan,S.Sos. M.AP	Pembina TK I (IV/b)	Sekretaris	S - 2	L	
3	H.Sofyan Hendratno, S.Sos	Pembina TK I (IV/b)	Kabid Penegaka n Perundan g - Undangan Daerah	S - 1	L	
4	Waterland wind fire, AP, MM	Pembina (IV/a)	Kabid Perlindung an Masyarak at	S - 2	L	
5	Emman Renaldy, BA	Pembina (IV/a)	Kabid Sumber Daya Aparatur	D - 3	L	
6	Drs. Rudiansyah Azhar	Penata TK. I (III/d)	Kabid Ketertiban Umum Dan Ketentram an	S - 1	L	

			Masyarakat			
7	Umi Salamah, SE	Penata TK.I (III/d)	Kasubag Keuangan	S – 1		P
8	Muhammad Husni, S.Sos	Penata TK.I (III/d)	Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	S – 1	L	
9	M. Rasyid Wahyuni, S.Sos	Penata TK.I (III/d)	Kasi Operasi Dan Pengendalian	S – 1	L	
10	Hairunnisa Halim, S. Ag	Penata TK .I (III/d)	Kasi Teknis Fungsional	S - 1		P
11	Syakir,SH	Penata TK.I (III/d)	Kasi Penyelidikan Dan Penyidikan	S – 1	L	
12	Syafrudin Prawira Buana, SE	Penata (III.c)	Kasi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan	S – 1	L	

13	Taufik, SE. MM	Penata (III.c)	Kasubag Perencanaan	S – 2	L	
14	H. Muhammad Syahri Fadhli, S. Kom	Penata (III.c)	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	S – 1	L	
15	Sugiyono, S.Sos	Penata (III/c)	Kepala UPT Damkar	S – 1	L	
16	Yanto Hidayat, SE	Penata (III/c)	Kasi Pelatihan Dasar	S – 1	L	
17	Amul Kaswari, SE. MM	Penata TK.I (III/d)	Kasi Perlindungan Masyarakat	S – 2	L	
18	Syariyadi, SE	Penata (III.c)	Kasi Kerjasama	S – 1	L	
19	Rini Ariesanti, SE	Penata (III.c)	Kasubag Umpeg UPT Damkar	S – 1		P
20	H. Muhammad Husni, S.Sos	Pembina TK.I (IV/b)	Pol PP Madya	S – 1	L	
21	Syamsiar Panani,	Penata	Pol PP	S – 1	L	

	SE	(III/c)	Muda			
22	Juliono, SE	Penata (III/c)	Petugas Penindaka n Lapangan Penempat an Di Kecamata n	S - 1	L	
23	Muhammad Ruslie, SE	Penata (III/c)	Pol PP Muda	S - 1	L	
24	Dooni Kusworo, SE	Penata (III/c)	Pol PP Muda	S - 1	L	
25	Heru Suseno, SE	Penata (III/c)	Pol PP Muda	S - 1	L	
26	Rahyadi Jaya	Penata Muda TK.I (III/b)	Petugas Penindaka n	SLTA	L	
27	Rahmawati, SE	Penata Muda TK. I (III/b)	Bendahar a	S - 1		P
28	Rusdiyantoro, SH	Penata Muda (III/a)	Pengadmi nistrasi Kepegawa ian	S - 1	L	
29	Zulkipli Pahriyanoor, SH	Penata Muda (III/a)	Pol PP Pelaksana Lanjutan	S - 1	L	

30	Darsani, SH	Penata Muda (III/a)	Pol PP Pertama	S – 1	L	
31	Susie Dyah Soelistingtyas, A.Md	Penata Muda (III/a)	Pengelola Sarana Dan Prasarana Kantor	S – 1		P
32	Tedi Suherman	Penata Muda (III/a)	Petugas Penindakan	S - 1	L	
33	Akhmad Yamani, A.Md	Pengatur TK.I (II/d)	Pranata Komputer Pelaksana	D – 3	L	
34	Rachmad Firdaus	Pengatur TK.I (II/d)	Pengadmi nistrasi Umum	SLTA	L	
35	Sudarmu, SH	Pengatur TK.I (II/d)	Pol PP Pelaksana	S – 1	L	
36	Mahyudin	Pengatur TK.I (II/d)	Petugas Penindakan	SLTA	L	
37	Ferry Irawan	Pengatur TK.I (II/d)	Petugas Penindakan	SLTA	L	
38	Sigit Wastanto	Pengatur TK.I (II/d)	Petugas Penindakan	SLTA	L	
39	Akhmad Dianoor	Pengatur	Petugas	SLTA	L	

		TK.I (II/d)	Penindaka n			
40	Muhammad Sya'rani	Pengatur TK.I (II/d)	Petugas Penindaka n	SLTA	L	
41	Aji Tiowarman	Pengatur TK.I (II/d)	Petugas Penindaka n	SLTA	L	
42	M. Syarkani	Pengatur TK.I (II/d)	Petugas Penindaka n	SLTA	L	
43	Rachmad Reidian	Pengatur TK.I (II/d)	Petugas Penindaka n	SLTA	L	
44	Mardiyanto	Pengatur TK.I (II/d)	Analisis Prencana an Evaluasi Dan Pelaporan	SLTA	L	
45	Hamdani	Pengatur TK.I (II/d)	Petugas Penindaka n	SLTA	L	
46	Said M Rifani	Pengatur TK.I (II/d)	Pengadmi nistrasi Umum	SLTA	L	
47	Marcus	Pengatur TK.I (II/d)	Pol PP Pelaksana	SLTA	L	

48	Hilal Najimi	Pengatur TK.I (II/d)	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	SLTA	L	
49	Khamaruudin	Pengatur TK.I (II/d)	Petugas Penindakan	SLTA	L	
50	Gunawan	Pengatur TK.I (II/d)	Petugas Penindakan	SLTA	L	
51	Noryadi	Pengatur (II/c)	Pol PP Pelaksana	SLTA	L	
52	Daud Tuapatinaya	Pengatur (II/c)	Pol PP Pelaksana	SLTA	L	
53	Ari Nispuadi	Pengatur (II/c)	Pol PP Pelaksana	SLTA	L	
54	Ahmad	Pengatur (II/c)	Pol PP Pelaksana	SLTA	L	
55	Ade Irawan Danu Saputra	Pengatur (II/c)	Pol PP Pelaksana	SLTA	L	
56	Muhamad Falahi	Pengatur (II/c)	Petugas Penindakan	SLTA	L	
57	Muhammad Abdi	Pengatur (II/c)	Petugas Penindakan	SLTA	L	
58	Ahmad Rosyadi	Pengatur	Petugas Penindakan	SLTA	L	

		(II/b)	n			
59	Suyantoro	Pengatur Muda TK I (II/b)	Pol PP Terampil	SLTA	L	
60	Herry Suriana	Pengatur Muda TK I (II/b)	Pol PP Pelaksana	SLTA	L	
61	M. Taufik Rahman	Pengatur Muda TK I (II/b)	Verifikator Keuangan	SLTA	L	

Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru berdasarkan Pendidikannya sebagai berikut :

NO	BERDASARKAN PENDIDIKAN	L	P	KETERANGAN
1	S-2	5	-	Orang
2	S-1	21	5	Orang
3	Diploma	2	-	Orang
4	SLTA	28	-	Orang
5	SLTP	0	-	Orang
	JUMLAH	56	5	Orang

2.1.2 Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang terampil dan profesional, juga ketersediaan sarana dan prasarana sebagai unsur penting pendukung kinerja anggota Satpol PP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Satpol PP Kota Banjarbaru. Untuk itu, berhasil tidaknya suatu program sekaligus menjadi penentu arah kebijakan program Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Sarana dan prasarana pendukung program kegiatan, merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk digunakan oleh Satpol PP dengan 4 kondisi baik dan layak pakai seperti ruang toilet laki-laki dan perempuan, Satpol PP belum memiliki Ruang Laktasi, Ruang Bermain Anak dan Jalan untuk Lansia dan Disabilitas.

Adapun jenis sarana prasarana yang tersedia pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru saat sekarang ini dapat terlihat pada tabel berikut :

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
1	Gedung Kantor	Buah	1	Baik
2	Ruang WC Laki-laki	Buah	1	Baik
3	Ruang WC Perempuan	Buah	1	Baik
4	Truck Dalmas	Buah	1	Baik
5	Hilux	Buah	1	Baik
6	Kijang Pick up dan Panther	Buah	3	Baik
7	Mobil Katana	Buah	1	Baik
8	Kendaraan Roda 2	Buah	9	Baik
		Buah	5	Baik
9	Lemari Besi	Buah	16	Baik

Adapun jenis sarana prasarana yang belum tersedia untuk saat ini pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru saat sekarang ini dan akan direncanakan pada waktu yang akan datang dapat terlihat pada tabel berikut :

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah
1	Ruang Laktasi	Buah	1
2	Ruang Bermain Anak	Buah	1
3	Jalan Lansia / Disabilitas	Buah	1

Jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Banjarbaru
dirinci sebagaimana berikut :

No.	Kode			Nama Barang	Merk / Type	Bahan	Kondiiisi	Asal Perolehan	Tanggal Perolehan	Nomor				UEB	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan Sebelumnya	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Sisa UEB	Nilai Buku
	Lokasi	Barang	Register							Rangka	Mesin	Polisi	BPKB							
1	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.02 .01.02.0 03	0004	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	MB. PENUM PANG	BESI	Baik	APBN	31-12-2012	MHKM1BA3J CK087925	DL71021	DA 636 R	L.0230 3611. M	7	164,750,00 0.00	164,750,000. 00	0.00	164,750,000. 00	0	0.00
2	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.01 .01.10.0 03	0001	Truck Crane	LIGHT TRUCK	BESI	Baik	APBN	31-12-2014	MHCNKR71H EJ061330	B061330	DA 901 R	L 02849 676 M	7	354,900,00 0.00	354,900,000. 00	0.00	354,900,000. 00	0	0.00
3	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.01.0 01	0001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	-	BESI	Baik	APBN	31-12-2012					5	2,000,000. 00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0	0.00
4	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.02 .01.04.0 01	0013	Sepeda Motor	SPM R2	BESI	Baik	APBN	31-12-2013	MH1KC3111D R293100	KC31E- 1291622	DA 2250 R	K 05584 942 M	5	19,577,850 .00	19,577,850.0 0	0.00	19,577,850.0 0	0	0.00
5	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.02 .01.04.0 01	0011	Sepeda Motor	SPM- R2/SOL O/NF 12AICF M/T	BESI	Baik	APBN	31-12-2014	MH1JBG11XE K177692	JBG1E- 1177187	DA 2012 RB	0	5	17,075,363 .00	17,075,363.0 0	0.00	17,075,363.0 0	0	0.00
6	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.02 .01.04.0 01	0009	Sepeda Motor	RD 2 SOLO/N F 12AICF M/T	BESI	Baik	APBN	31-12-2014	MH1JBG115E K177602	JBG1E- 1177195	DA 2105 RB	L 02179 833 M	5	14,821,750 .00	14,821,750.0 0	0.00	14,821,750.0 0	0	0.00
7	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.02 .01.04.0 01	0012	Sepeda Motor	SPM- R2/SOL O/NF 125 TD M/T	BESI	Baik	APBN	31-12-2014	MH1JB8116D K884986	JB81E18 81225	DA 2201 R	K 05584 952 M	5	17,075,363 .00	17,075,363.0 0	0.00	17,075,363.0 0	0	0.00

8	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.03 .03.06.0 07	0002	Waveform Monitor Set With Level And Vector Display	-	-	Baik	APBN	31-12-2014					5	2,000,000. 00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0	0.00
9	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.03 .03.06.0 07	0003	Waveform Monitor Set With Level And Vector Display	-	-	Baik	APBN	31-12-2014					5	2,000,000. 00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0	0.00
10	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .02.03.0 03	0005	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-		Baik	APBN	31-12-2014					5	1,750,000. 00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0	0.00
11	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.01.0 05	0005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-		Baik	APBN	31-12-2014					5	2,264,100. 00	2,264,100.00	0.00	2,264,100.00	0	0.00
12	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.01.0 05	0006	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-		Baik	APBN	31-12-2014					5	2,264,100. 00	2,264,100.00	0.00	2,264,100.00	0	0.00
13	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.01.0 05	0007	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-		Baik	APBN	31-12-2014					5	2,200,000. 00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0	0.00
14	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.03.0 04	0001	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	-		Baik	APBN	31-12-2014					5	3,188,900. 00	3,188,900.00	0.00	3,188,900.00	0	0.00
15	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.03.0 05	0002	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-		Baik	APBN	31-12-2014					5	1,435,000. 00	1,435,000.00	0.00	1,435,000.00	0	0.00
16	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.03.0 05	0003	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-		Baik	APBN	31-12-2014					5	1,435,000. 00	1,435,000.00	0.00	1,435,000.00	0	0.00
17	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.03.0 05	0004	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-		Baik	APBN	31-12-2014					5	1,435,000. 00	1,435,000.00	0.00	1,435,000.00	0	0.00

18	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.03.0 05	0005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-		Baik	APBN	31-12-2014					5	1,435,000. 00	1,435,000.00	0.00	1,435,000.00	0	0.00
19	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.03.0 05	0006	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-		Baik	APBN	31-12-2014					5	1,435,000. 00	1,435,000.00	0.00	1,435,000.00	0	0.00
20	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 05	0007	Filing Cabinet Besi	-		Baik	APBN	31-12-2015					5	2,200,000. 00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0	0.00
21	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 05	0008	Filing Cabinet Besi	-		Baik	APBN	31-12-2015					5	2,200,000. 00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0	0.00
22	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 05	0009	Filing Cabinet Besi	-		Baik	APBN	31-12-2015					5	2,200,000. 00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0	0.00
23	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 05	0010	Filing Cabinet Besi	-		Baik	APBN	31-12-2015					5	2,200,000. 00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0	0.00
24	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.07.0 4	0006	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-		Baik	APBN	31-12-2015					5	4,000,000. 00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0	0.00
25	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.07.0 4	0007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-		Baik	APBN	31-12-2015					5	4,000,000. 00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0	0.00
26	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.07.0 4	0008	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-		Baik	APBN	31-12-2015					5	4,000,000. 00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0	0.00
27	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 01	0001	P.C Unit	-		Baik	APBN	31-12-2015					5	7,300,000. 00	7,300,000.00	0.00	7,300,000.00	0	0.00

28	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 01	0002	P.C Unit	-		Baik	APBN	31-12-2015					5	8,400,000. 00	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0	0.00
29	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 01	0003	P.C Unit	-		Baik	APBN	31-12-2015					5	8,400,000. 00	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0	0.00
30	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.04 .01.04.0 05	0001	Lemari Penyimpan	-		Baik	APBN	31-12-2016					5	2,900,000. 00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0	0.00
31	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 01	0010	Lemari Besi/Metal	-		Baik	APBN	31-12-2016					5	3,029,801. 32	3,029,801.32	0.00	3,029,801.32	0	0.00
32	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 01	0011	Lemari Besi/Metal	-		Baik	APBN	31-12-2016					5	3,029,801. 32	3,029,801.32	0.00	3,029,801.32	0	0.00
33	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 01	0012	Lemari Besi/Metal	-		Baik	APBN	31-12-2016					5	3,029,801. 32	3,029,801.32	0.00	3,029,801.32	0	0.00
34	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 05	0011	Filing Cabinet Besi	-		Baik	APBN	31-12-2016					5	2,474,337. 75	2,474,337.75	0.00	2,474,337.75	0	0.00
35	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 05	0012	Filing Cabinet Besi	-		Baik	APBN	31-12-2016					5	2,474,337. 75	2,474,337.75	0.00	2,474,337.75	0	0.00
36	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 05	0013	Filing Cabinet Besi	-		Baik	APBN	31-12-2016					5	2,474,337. 75	2,474,337.75	0.00	2,474,337.75	0	0.00
37	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 02	0006	Lemari Kayu	-		Baik	APBN	31-12-2016					5	10,000,000 .00	10,000,000.0 0	0.00	10,000,000.0 0	0	0.00

38	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 02	0007	Lemari Kayu	-		Baik	APBN	31-12-2016					5	1,950,000. 00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0	0.00
39	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 02	0008	Lemari Kayu	-		Baik	APBN	31-12-2016					5	1,950,000. 00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0	0.00
40	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 02	0009	Lemari Kayu	-		Baik	APBN	31-12-2016					5	1,950,000. 00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0	0.00
41	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 02	0010	Lemari Kayu	-		Baik	APBN	31-12-2016					5	1,950,000. 00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0	0.00
42	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 01	0014	P.C Unit	-		Baik	APBN	31-12-2016					5	8,528,337. 45	8,528,337.45	0.00	8,528,337.45	0	0.00
43	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 01	0015	P.C Unit	-		Baik	APBN	31-12-2016					5	8,528,337. 45	8,528,337.45	0.00	8,528,337.45	0	0.00
44	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 01	0016	P.C Unit	-		Baik	APBN	31-12-2016					5	8,528,337. 45	8,528,337.45	0.00	8,528,337.45	0	0.00
45	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .02.03.0 03	0009	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-		Baik	APBN	31-12-2016					5	1,766,223. 73	1,766,223.73	0.00	1,766,223.73	0	0.00
46	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .02.03.0 03	0010	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-		Baik	APBN	31-12-2016					5	1,766,223. 73	1,766,223.73	0.00	1,766,223.73	0	0.00
47	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .02.03.0 03	0011	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-		Baik	APBN	31-12-2016					5	1,766,223. 73	1,766,223.73	0.00	1,766,223.73	0	0.00

48	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .02.03.0 03	0012	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-		Baik	APBN	31-12-2016					5	1,766,223. 73	1,766,223.73	0.00	1,766,223.73	0	0.00
49	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.06 .01.01.0 48	0001	Uninterrupti ble Power Supply (UPS)	-		Baik	APBN	31-12-2016					5	1,493,720. 64	1,493,720.64	0.00	1,493,720.64	0	0.00
50	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.06 .01.01.0 48	0002	Uninterrupti ble Power Supply (UPS)	-		Baik	APBN	31-12-2016					5	1,493,720. 64	1,493,720.64	0.00	1,493,720.64	0	0.00
51	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.06 .01.01.0 48	0003	Uninterrupti ble Power Supply (UPS)	-		Baik	APBN	31-12-2016					5	1,493,720. 64	1,493,720.64	0.00	1,493,720.64	0	0.00
52	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.01.0 04	0002	Meja Kerja Pejabat Eselon II	-		Baik	APBN	31-12-2016					5	3,000,000. 00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0	0.00
53	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.06.0 03	0001	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	-		Baik	APBN	31-12-2016					5	7,500,000. 00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0	0.00
54	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.06.0 03	0003	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	-		Baik	APBN	31-12-2016					5	1,950,000. 00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0	0.00
55	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.08 .01.13.0 81	0001	TV Monitor	TV TABUN G	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2011					5	4,250,000. 00	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	0	0.00
56	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 03	0003	Note Book	acer	plastik	Baik	APBN	31-12-2011					5	3,500,000. 00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0	0.00
57	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 03	0004	Note Book	acer	plastik	Baik	APBN	31-12-2011					5	3,500,000. 00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0	0.00

58	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.06.0 22	0001	Camera film	canon	plastik	Baik	APBN	31-12-2011					5	1,500,000. 00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0	0.00
59	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.07.0 4	0003	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2 pintu buka	kayu	Baik	APBN	31-12-2012					5	2,750,000. 00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0	0.00
60	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 01	0012	P.C Unit	PC	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2013					5	17,000,000 .00	17,000,000.0 0	0.00	17,000,000.0 0	0	0.00
61	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.06 .02.10.0 04	0001	Wireless Base Station + Surveillanc e Manpack Kit	-	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2013					5	40,000,000 .00	40,000,000.0 0	0.00	40,000,000.0 0	0	0.00
62	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 01	0013	P.C Unit	PC	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2013					5	8,500,000. 00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0	0.00
63	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 01	0009	Lemari Besi/Metal	4 LACI	BESI/M ETAL	Baik	APBN	31-12-2014					5	2,750,000. 00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0	0.00
64	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 02	0004	Lemari Kayu	NN	KAYU	Baik	APBN	31-12-2014					5	1,750,000. 00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0	0.00
65	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 02	0005	Lemari Kayu	NN	KAYU	Baik	APBN	31-12-2014					5	1,750,000. 00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0	0.00
66	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.01.0 48	0002	Sofa	NN	BUSA	Baik	APBN	31-12-2014					5	8,500,000. 00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0	0.00
67	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.04.0 01	0002	Lemari Es	1 PINTU	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2014					5	2,500,000. 00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0	0.00

68	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.06.0 02	0002	Televisi	LED TV	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2014					5	4,500,000. 00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0	0.00
69	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.06.0 02	0003	Televisi	LED TV	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2014					5	4,500,000. 00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0	0.00
70	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.06.0 08	0001	Sound System	NN	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2014					5	3,000,000. 00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0	0.00
71	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.01.0 04	0001	Meja Kerja Pejabat Eselon II	NN	KAYU	Baik	APBN	31-12-2014					5	3,125,000. 00	3,125,000.00	0.00	3,125,000.00	0	0.00
72	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.01.0 05	0004	Meja Kerja Pejabat Eselon III	NN	KAYU	Baik	APBN	31-12-2014					5	2,264,100. 00	2,264,100.00	0.00	2,264,100.00	0	0.00
73	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.06 .02.01.0 06	0019	Handy Talky (HT)	GENGG AM	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2014					5	5,000,000. 00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0	0.00
74	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.06 .02.01.0 06	0033	Handy Talky (HT)	GENGG AM	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2014					5	2,500,000. 00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0	0.00
75	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.09 .01.01.0 02	0002	Pistol	GENGG AM	BESI	Baik	APBN	31-12-2014					5	49,510,000 .00	49,510,000.0 0	0.00	49,510,000.0 0	0	0.00
76	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.09 .01.01.0 02	0003	Pistol	GENGG AM	BESI	Baik	APBN	31-12-2014					5	49,510,000 .00	49,510,000.0 0	0.00	49,510,000.0 0	0	0.00
77	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 01	0008	P.C Unit	NN	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2014					5	8,500,000. 00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0	0.00

78	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 01	0009	P.C Unit	NN	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2014					5	8,500,000. 00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0	0.00
79	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 01	0010	P.C Unit	NN	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2014					5	8,500,000. 00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0	0.00
80	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.02 .01.04.0 01	0014	Sepeda Motor	SPM- R2/SOL O / AFX12U 21008 MT	BESI	Baik	APBN	31-12-2015	MH1JBP11XF K324322	JBP1E- 1322341	DA-2010- R	L.0721 9573 M	5	17,122,000 .00	17,122,000.0 0	0.00	17,122,000.0 0	0	0.00
81	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.06.0 48	0001	Handy Cam	GENGG AM	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2015					5	6,930,000. 00	6,930,000.00	0.00	6,930,000.00	0	0.00
82	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.01.0 48	0001	Sofa	NN	KAYU	Baik	APBN	31-12-2011					5	2,500,000. 00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0	0.00
83	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.09 .01.01.0 02	0004	Pistol	-	BESI	Baik	APBN	31-12-2015					5	87,500,000 .00	87,500,000.0 0	0.00	87,500,000.0 0	0	0.00
84	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.04.0 04	0004	A.C. Split	LG / 1 PK	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2016					5	4,250,000. 00	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	0	0.00
85	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.04.0 04	0005	A.C. Split	LG / 1 PK	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2016					5	4,250,000. 00	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	0	0.00
86	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 02	0001	Lap Top	-	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2016					5	11,285,000 .00	11,285,000.0 0	0.00	11,285,000.0 0	0	0.00
87	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 02	0002	Lap Top	-	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2016					5	11,600,000 .00	11,600,000.0 0	0.00	11,600,000.0 0	0	0.00

88	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.06 .02.06.0 02	0001	Wireless Amplifier	-	BESI	Baik	APBN	31-12-2015					5	2,250,000. 00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0	0.00
89	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 03	0006	Note Book	ASUS / ASUS X450 JN	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2015					5	12,400,000 .00	12,400,000.0 0	0.00	12,400,000.0 0	0	0.00
90	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .02.03.0 03	0010	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON / MP 287 INJEK MULTI FUNGSI	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2015					5	1,700,000. 00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0	0.00
91	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.04.0 01	0003	Lemari Es	PANAS ONIC / 1 PINTU	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2016					5	2,524,834. 44	2,524,834.44	0.00	2,524,834.44	0	0.00
92	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.04.0 01	0004	Lemari Es	PANAS ONIC / 1 PINTU	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2016					5	2,524,834. 44	2,524,834.44	0.00	2,524,834.44	0	0.00
93	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 27	0001	Lemari Kaca	-	KACA/M ETAL	Baik	APBN	31-12-2016					5	4,494,205. 30	4,494,205.30	0.00	4,494,205.30	0	0.00
94	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 27	0002	Lemari Kaca	-	KACA/M ETAL	Baik	APBN	31-12-2016					5	4,494,205. 30	4,494,205.30	0.00	4,494,205.30	0	0.00
95	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.06 .01.02.0 03	0001	Camera Electronic	-		Baik	APBN	31-12-2016					5	6,705,000. 00	6,705,000.00	0.00	6,705,000.00	0	0.00
96	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.06 .02.01.0 10	0001	Facsimile	-		Baik	APBN	31-12-2016					5	3,029,801. 32	3,029,801.32	0.00	3,029,801.32	0	0.00
97	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.02 .01.06.0 04	0001	Mobil Pemadam Kebakaran	-		Baik	APBN	31-12-2008					5	214,000,00 0.00	214,000,000. 00	0.00	214,000,000. 00	0	0.00

98	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.02 .01.06.0 04	0002	Mobil Pemadam Kebakaran	-		Baik	APBN	31-12-2008					5	214,000,00 0.00	214,000,000. 00	0.00	214,000,000. 00	0	0.00
99	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.02 .01.06.0 04	0003	Mobil Pemadam Kebakaran	-		Baik	APBN	31-12-2008					5	220,000,00 0.00	220,000,000. 00	0.00	220,000,000. 00	0	0.00
100	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.02 .01.06.0 04	0004	Mobil Pemadam Kebakaran	-		Baik	APBN	31-12-2008					5	233,000,00 0.00	233,000,000. 00	0.00	233,000,000. 00	0	0.00
101	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.02 .01.06.0 04	0005	Mobil Pemadam Kebakaran	-		Baik	APBN	31-12-2014					5	460,000,00 0.00	460,000,000. 00	0.00	460,000,000. 00	0	0.00
102	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.02 .01.06.0 06	0001	Mobil Tangki Air	-		Baik	APBN	31-12-2008					5	200,000,00 0.00	200,000,000. 00	0.00	200,000,000. 00	0	0.00
103	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.02 .01.06.0 06	0002	Mobil Tangki Air	-		Baik	APBN	31-12-2013					5	324,355,35 0.00	324,355,350. 00	0.00	324,355,350. 00	0	0.00
104	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.07.0 02	0004	Pompa Kebakaran/ Portable	-		Baik	APBN	31-12-2014					5	150,800,00 0.00	150,800,000. 00	0.00	150,800,000. 00	0	0.00
105	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .02.03.0 03	0001	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-		Baik	APBN	31-12-2014					5	2,440,000. 00	2,440,000.00	0.00	2,440,000.00	0	0.00
106	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 01	0016	Lemari Besi/Metal	-		Baik	APBN	31-12-2017					5	3,921,081. 08	3,136,864.86	0.00	3,136,864.86	1	784,216 .22
107	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 05	0016	Filing Cabinet Besi	-		Baik	APBN	31-12-2017					5	2,412,972. 97	1,930,378.38	0.00	1,930,378.38	1	482,594 .59

108	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 05	0017	Filing Cabinet Besi	-		Baik	APBN	31-12-2017					5	2,412,972. 97	1,930,378.38	0.00	1,930,378.38	1	482,594 .59
109	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 05	0018	Filing Cabinet Besi	-		Baik	APBN	31-12-2017					5	2,412,972. 97	1,930,378.38	0.00	1,930,378.38	1	482,594 .59
110	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 05	0019	Filing Cabinet Besi	-		Baik	APBN	31-12-2017					5	2,412,972. 97	1,930,378.38	0.00	1,930,378.38	1	482,594 .59
111	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 05	0020	Filing Cabinet Besi	-		Baik	APBN	31-12-2017					5	2,412,972. 97	1,930,378.38	0.00	1,930,378.38	1	482,594 .59
112	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.01.0 03	0003	Kursi Besi/Metal	-		Baik	APBN	31-12-2017					5	1,725,000. 00	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	1	345,000 .00
113	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.01.0 03	0004	Kursi Besi/Metal	-		Baik	APBN	31-12-2017					5	1,725,000. 00	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	1	345,000 .00
114	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.01.0 03	0005	Kursi Besi/Metal	-		Baik	APBN	31-12-2017					5	2,815,135. 14	2,252,108.11	0.00	2,252,108.11	1	563,027 .03
115	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.01.0 03	0006	Kursi Besi/Metal	-		Baik	APBN	31-12-2017					5	2,815,135. 14	2,252,108.11	0.00	2,252,108.11	1	563,027 .03
116	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 01	0022	P.C Unit	-		Baik	APBN	31-12-2017					5	8,499,705. 88	6,799,764.70	0.00	6,799,764.70	1	1,699,9 41.18
117	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 01	0023	P.C Unit	-		Baik	APBN	31-12-2017					5	12,376,688 .60	9,901,350.88	0.00	9,901,350.88	1	2,475,3 37.72

118	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 01	0024	P.C Unit	-		Baik	APBN	31-12-2017					5	12,376,688 .60	9,901,350.88	0.00	9,901,350.88	1	2,475,3 37.72
119	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 01	0025	P.C Unit	-		Baik	APBN	31-12-2017					5	12,376,688 .60	9,901,350.88	0.00	9,901,350.88	1	2,475,3 37.72
120	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 02	0009	Lap Top	-		Baik	APBN	31-12-2017					5	12,523,235 .29	10,018,588.2 3	0.00	10,018,588.2 3	1	2,504,6 47.06
121	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 02	0010	Lap Top	-		Baik	APBN	31-12-2017					5	12,523,235 .29	10,018,588.2 3	0.00	10,018,588.2 3	1	2,504,6 47.06
122	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 02	0011	Lap Top	-		Baik	APBN	31-12-2017					5	12,376,688 .60	9,901,350.88	0.00	9,901,350.88	1	2,475,3 37.72
123	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 02	0012	Lap Top	-		Baik	APBN	31-12-2017					5	12,376,688 .60	9,901,350.88	0.00	9,901,350.88	1	2,475,3 37.72
124	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .02.03.0 03	0012	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-		Baik	APBN	31-12-2017					5	1,735,147. 06	1,388,117.65	0.00	1,388,117.65	1	347,029 .41
125	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .02.03.0 03	0013	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-		Baik	APBN	31-12-2017					5	1,735,147. 06	1,388,117.65	0.00	1,388,117.65	1	347,029 .41
126	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.07.0 4	0009	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-		Baik	APBN	31-12-2017					5	2,714,594. 59	2,171,675.67	0.00	2,171,675.67	1	542,918 .92
127	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.07.0 4	0010	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-		Baik	APBN	31-12-2017					5	2,714,594. 59	2,171,675.67	0.00	2,171,675.67	1	542,918 .92

128	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.07.0 4	0011	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-		Baik	APBN	31-12-2017					5	2,714,594. 59	2,171,675.67	0.00	2,171,675.67	1	542,918 .92
129	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.07.0 4	0012	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-		Baik	APBN	31-12-2017					5	2,714,594. 59	2,171,675.67	0.00	2,171,675.67	1	542,918 .92
130	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.07.0 4	0013	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-		Baik	APBN	31-12-2017					5	2,714,594. 59	2,171,675.67	0.00	2,171,675.67	1	542,918 .92
131	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.07.0 4	0014	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-		Baik	APBN	31-12-2017					5	2,714,594. 59	2,171,675.67	0.00	2,171,675.67	1	542,918 .92
132	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.06 .02.01.0 06	0034	Handy Talky (HT)	-		Baik	APBN	31-12-2017					5	25,046,470 .59	20,037,176.4 7	0.00	20,037,176.4 7	1	5,009,2 94.12
133	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.06 .02.01.0 06	0035	Handy Talky (HT)	-		Baik	APBN	31-12-2017					5	1,911,846. 00	1,529,476.80	0.00	1,529,476.80	1	382,369 .20
134	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.06 .02.01.0 06	0036	Handy Talky (HT)	-		Baik	APBN	31-12-2017					5	1,911,846. 00	1,529,476.80	0.00	1,529,476.80	1	382,369 .20
135	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.06 .02.02.0 03	0001	Unit Tranceiver Ssb Stationery	-		Baik	APBN	31-12-2017					5	34,665,000 .00	27,732,000.0 0	0.00	27,732,000.0 0	1	6,933,0 00.00
136	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 05	0021	Filing Cabinet Besi	-		Baik	APBN	31-12-2018					5	2,450,000. 00	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	2	980,000 .00
137	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 05	0022	Filing Cabinet Besi	-		Baik	APBN	31-12-2018					5	2,450,000. 00	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	2	980,000 .00

138	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.01.0 03	0007	Kursi Besi/Metal	-		Baik	APBN	31-12-2018					5	1,750,000. 00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	2	700,000 .00
139	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 01	0026	P.C Unit	-		Baik	APBN	31-12-2018					5	8,303,808. 25	4,982,284.95	0.00	4,982,284.95	2	3,321,5 23.30
140	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 01	0027	P.C Unit	-		Baik	APBN	31-12-2018					5	8,303,808. 25	4,982,284.95	0.00	4,982,284.95	2	3,321,5 23.30
141	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 02	0013	Lap Top	-		Baik	APBN	31-12-2018					5	12,329,897 .09	7,397,938.25	0.00	7,397,938.25	2	4,931,9 58.84
142	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 02	0014	Lap Top	-		Baik	APBN	31-12-2018					5	12,329,897 .09	7,397,938.25	0.00	7,397,938.25	2	4,931,9 58.84
143	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.06.0 68	0003	Tangga	tangga lipat	alumeni um/besi	Baik	APBN	31-12-2018					5	1,860,000. 00	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	2	744,000 .00
144	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 01	0003	Lemari Besi/Metal	2 pintu	besi	Baik	APBN	31-12-2005					5	1,004,000. 00	1,004,000.00	0.00	1,004,000.00	0	0.00
145	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 01	0002	Lemari Besi/Metal	PINTU 4	BESI/M ETAL	Baik	APBN	31-12-2014					5	2,500,000. 00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0	0.00
146	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.02 .01.04.0 01	0001	Sepeda Motor	SPM R2	BESI	Baik	APBN	31-12-2006					5	10,120,000 .00	10,120,000.0 0	0.00	10,120,000.0 0	0	0.00
147	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.03 .01.01.0 18	0001	Mesin Kompresor	TABUN G	BESI	Baik	APBN	31-12-2014					5	1,450,000. 00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0	0.00

148	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.03 .02.05.0 02	0001	Tool Kit Box	NN	BESI	Baik	APBN	31-12-2014					5	2,500,000. 00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0	0.00
149	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 05	0001	Filing Cabinet Besi	4 LACI	BESI/M ETAL	Baik	APBN	31-12-2014					5	2,000,000. 00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0	0.00
150	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 05	0002	Filing Cabinet Besi	4 LACI	BESI/M ETAL	Baik	APBN	31-12-2014					5	2,000,000. 00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0	0.00
151	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.04.0 01	0001	Lemari Es	1 PINTU	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2014					5	2,200,000. 00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0	0.00
152	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.06.0 02	0001	Televisi	LED TV	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2014					5	4,500,000. 00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0	0.00
153	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.06 .02.01.0 06	0001	Handy Talky (HT)	GENGG AM	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2014					5	2,850,000. 00	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0	0.00
154	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.06 .02.01.0 06	0002	Handy Talky (HT)	GENGG AM	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2014					5	2,850,000. 00	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0	0.00
155	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.06 .02.01.0 06	0003	Handy Talky (HT)	GENGG AM	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2014					5	2,850,000. 00	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0	0.00
156	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.05.0 11	0003	Treng Air/Tandon Air	-	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2018					5	4,500,000. 00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	2	1,800,0 00.00
157	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.05.0 11	0002	Treng Air/Tandon Air	-	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2018					5	3,360,000. 00	2,016,000.00	0.00	2,016,000.00	2	1,344,0 00.00

158	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.05.0 11	0001	Treng Air/Tandon Air	-	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2018					5	3,360,000. 00	2,016,000.00	0.00	2,016,000.00	2	1,344,0 00.00
159	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.04.0 04	0011	A.C. Split	SHARP / 1 PK	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2018					5	5,300,000. 00	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	2	2,120,0 00.00
160	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.04.0 04	0009	A.C. Split	SHARP / 1 PK	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2018					5	5,300,000. 00	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	2	2,120,0 00.00
161	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.06.0 68	0001	Tangga	NN	BESI/M ETAL	Baik	APBN	31-12-2016					5	11,475,000 .00	11,475,000.0 0	0.00	11,475,000.0 0	0	0.00
162	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.06.0 68	0002	Tangga	NN	BESI/M ETAL	Baik	APBN	31-12-2016					5	11,475,000 .00	11,475,000.0 0	0.00	11,475,000.0 0	0	0.00
163	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.09 .01.01.0 02	0005	Pistol	-	BESI	Baik	APBN	31-12-2016					5	86,450,000 .00	86,450,000.0 0	0.00	86,450,000.0 0	0	0.00
164	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.02.0 10	0001	Mesin Absen (Time Recorder)	-	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2017					5	4,750,000. 00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	1	950,000 .00
165	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.03.0 03	0001	Mesin Pemotong Rumput	-	BESI	Baik	APBN	31-12-2017					5	4,876,216. 22	3,900,972.98	0.00	3,900,972.98	1	975,243 .24
166	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.04.0 01	0007	Lemari Es	1 PINTU	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2017					5	2,464,411. 76	1,971,529.41	0.00	1,971,529.41	1	492,882 .35
167	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.04.0 04	0006	A.C. Split	-	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2017					5	5,931,891. 89	4,745,513.51	0.00	4,745,513.51	1	1,186,3 78.38

168	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.06.0 59	0002	Gordyin/Kr ay	-	KAIN	Baik	APBN	31-12-2017					5	13,500,000 .00	10,800,000.0 0	0.00	10,800,000.0 0	1	2,700,0 00.00
169	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.06.0 02	0007	Televisi	-	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2017					5	3,470,294. 12	2,776,235.30	0.00	2,776,235.30	1	694,058 .82
170	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.06 .01.01.0 48	0004	Uninterrupti ble Power Supply (UPS)	ICA / 600VA	BESI	Baik	APBN	31-12-2017					5	1,483,677. 10	1,186,941.68	0.00	1,186,941.68	1	296,735 .42
171	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.06 .03.47.0 02	0003	Genset	-	BESI	Baik	APBN	31-12-2017					5	4,476,176. 47	3,580,941.18	0.00	3,580,941.18	1	895,235 .29
172	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.06.0 08	0001	Sound System	-	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2018					5	8,404,460. 47	5,042,676.28	0.00	5,042,676.28	2	3,361,7 84.19
173	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.06.0 57	0025	Karpet	-	KAIN	Baik	APBN	31-12-2018					5	10,000,000 .00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2	4,000,0 00.00
174	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.01 .03.05.0 02	0001	Portable Water Pump	-	BESI	Baik	APBN	31-12-2010					5	24,950,000 .00	24,950,000.0 0	0.00	24,950,000.0 0	0	0.00
175	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.06 .02.02.0 01	0001	Unit Tranceiver Ssb Portable	Icom/IC 2200H	BESI	Baik	APBN	31-12-2012					5	9,890,000. 00	9,890,000.00	0.00	9,890,000.00	0	0.00
176	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 01	0001	Lemari Besi/Metal	-	BESI/M ETAL	Baik	APBN	31-12-2014					5	2,500,000. 00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0	0.00
177	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 02	0001	Lap Top	-	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2014					5	12,400,000 .00	12,400,000.0 0	0.00	12,400,000.0 0	0	0.00

178	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.05.0 02	0001	CCTV - Camera Control Television System	-	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2016					5	6,059,602. 65	6,059,602.65	0.00	6,059,602.65	0	0.00
179	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.05.0 03	0004	Papan Visual/Pap an Nama	-	KAYU	Baik	APBN	31-12-2017					5	12,000,000 .00	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	1	2,400,0 00.00
180	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.06.0 57	0001	Karpet	-	-	Baik	APBN	31-12-2017					5	2,750,000. 00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1	550,000 .00
181	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.06.0 57	0013	Karpet	-	-	Baik	APBN	31-12-2017					5	1,200,000. 00	960,000.00	0.00	960,000.00	1	240,000 .00
182	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.06.0 57	0014	Karpet	-	-	Baik	APBN	31-12-2017					5	1,200,000. 00	960,000.00	0.00	960,000.00	1	240,000 .00
183	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.06.0 57	0016	Karpet	-	-	Baik	APBN	31-12-2017					5	1,200,000. 00	960,000.00	0.00	960,000.00	1	240,000 .00
184	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.06.0 57	0017	Karpet	-	-	Baik	APBN	31-12-2017					5	1,200,000. 00	960,000.00	0.00	960,000.00	1	240,000 .00
185	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.01.0 06	0027	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-		Baik	APBN	31-12-2018					5	1,920,000. 00	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	2	768,000 .00
186	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.03.0 05	0007	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-		Baik	APBN	31-12-2018					5	2,000,000. 00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	2	800,000 .00
187	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.07.0 4	0015	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-		Baik	APBN	31-12-2018					5	3,720,000. 00	2,232,000.00	0.00	2,232,000.00	2	1,488,0 00.00

188	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.07.0 4	0016	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-		Baik	APBN	31-12-2018					5	3,720,000. 00	2,232,000.00	0.00	2,232,000.00	2	1,488,0 00.00
189	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 01	0017	Lemari Besi/Metal	-		Baik	APBN	31-12-2019					5	3,946,487. 98	1,578,595.19	0.00	1,578,595.19	3	2,367,8 92.79
190	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 01	0018	Lemari Besi/Metal	-		Baik	APBN	31-12-2019					5	3,946,987. 95	1,578,795.18	0.00	1,578,795.18	3	2,368,1 92.77
191	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 05	0023	Filing Cabinet Besi	-		Baik	APBN	31-12-2019					5	2,479,518. 07	991,807.23	0.00	991,807.23	3	1,487,7 10.84
192	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 05	0024	Filing Cabinet Besi	-		Baik	APBN	31-12-2019					5	2,479,518. 07	991,807.23	0.00	991,807.23	3	1,487,7 10.84
193	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 05	0025	Filing Cabinet Besi	-		Baik	APBN	31-12-2019					5	2,479,518. 07	991,807.23	0.00	991,807.23	3	1,487,7 10.84
194	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 05	0026	Filing Cabinet Besi	-		Baik	APBN	31-12-2019					5	2,479,518. 07	991,807.23	0.00	991,807.23	3	1,487,7 10.84
195	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 05	0027	Filing Cabinet Besi	-		Baik	APBN	31-12-2019					5	2,479,518. 07	991,807.23	0.00	991,807.23	3	1,487,7 10.84
196	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 01	0001	Lemari Besi/Metal	-		Baik	APBN	31-12-2019					5	2,934,939. 76	1,173,975.90	0.00	1,173,975.90	3	1,760,9 63.86
197	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 01	0002	Lemari Besi/Metal	-		Baik	APBN	31-12-2019					5	2,934,939. 76	1,173,975.90	0.00	1,173,975.90	3	1,760,9 63.86

198	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 01	0003	Lemari Besi/Metal	-		Baik	APBN	31-12-2019					5	2,934,939. 76	1,173,975.90	0.00	1,173,975.90	3	1,760,9 63.86
199	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.01.0 03	0008	Kursi Besi/Metal	-		Baik	APBN	31-12-2019					5	2,580,000. 00	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	3	1,548,0 00.00
200	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.01.0 03	0009	Kursi Besi/Metal	-		Baik	APBN	31-12-2019					5	2,580,000. 00	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	3	1,548,0 00.00
201	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.01.0 03	0010	Kursi Besi/Metal	-		Baik	APBN	31-12-2019					5	2,934,939. 76	1,173,975.90	0.00	1,173,975.90	3	1,760,9 63.86
202	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.01.0 03	0011	Kursi Besi/Metal	-		Baik	APBN	31-12-2019					5	2,934,939. 76	1,173,975.90	0.00	1,173,975.90	3	1,760,9 63.86
203	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.06 .01.01.0 48	0009	Uninterrupti ble Power Supply (UPS)	-		Baik	APBN	31-12-2019					5	1,474,847. 66	589,939.06	0.00	589,939.06	3	884,908 .60
204	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.06 .01.01.0 48	0010	Uninterrupti ble Power Supply (UPS)	-		Baik	APBN	31-12-2019					5	1,474,847. 66	589,939.06	0.00	589,939.06	3	884,908 .60
205	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.06 .02.01.0 06	0037	Handy Talky (HT)	-		Baik	APBN	31-12-2019					5	1,800,000. 00	720,000.00	0.00	720,000.00	3	1,080,0 00.00
206	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.06 .02.01.0 06	0038	Handy Talky (HT)	-		Baik	APBN	31-12-2019					5	1,800,000. 00	720,000.00	0.00	720,000.00	3	1,080,0 00.00
207	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.06 .02.01.0 06	0039	Handy Talky (HT)	-		Baik	APBN	31-12-2019					5	1,800,000. 00	720,000.00	0.00	720,000.00	3	1,080,0 00.00

208	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.06 .02.01.0 06	0040	Handy Talky (HT)	-		Baik	APBN	31-12-2019					5	1,800,000. 00	720,000.00	0.00	720,000.00	3	1,080,0 00.00
209	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.06 .02.01.0 06	0041	Handy Talky (HT)	-		Baik	APBN	31-12-2019					5	1,800,000. 00	720,000.00	0.00	720,000.00	3	1,080,0 00.00
210	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.06 .02.02.0 04	0004	Alat Komunikasi Radio SSB Lain-lain	-		Baik	APBN	31-12-2019					5	5,575,000. 00	2,230,000.00	0.00	2,230,000.00	3	3,345,0 00.00
211	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.02.0 10	0002	Mesin Absen (Time Recorder)	-		Baik	APBN	31-12-2019					5	4,519,285. 72	1,807,714.29	0.00	1,807,714.29	3	2,711,5 71.43
212	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .02.03.0 03	0017	Printer (Peralatan Personal Komputer)	MULTI FUNGSI	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2019					5	2,992,006. 52	1,196,802.61	0.00	1,196,802.61	3	1,795,2 03.91
213	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .02.03.0 03	0016	Printer (Peralatan Personal Komputer)	MULTI FUNGSI	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2019					5	2,992,006. 52	1,196,802.61	0.00	1,196,802.61	3	1,795,2 03.91
214	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .02.03.0 03	0014	Printer (Peralatan Personal Komputer)	MULTI FUNGSI	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2019					5	2,992,006. 52	1,196,802.61	0.00	1,196,802.61	3	1,795,2 03.91
215	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 02	0016	Lap Top	ASUS / A409 FJ CI5 SSD	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2019					5	11,847,136 .93	4,738,854.77	0.00	4,738,854.77	3	7,108,2 82.16
216	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 02	0015	Lap Top	ASUS / A409 FJ CI5 SSD	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2019					5	11,847,136 .93	4,738,854.77	0.00	4,738,854.77	3	7,108,2 82.16
217	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 01	0028	P.C Unit	ACER / C22-320	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2019					5	7,918,239. 48	3,167,295.79	0.00	3,167,295.79	3	4,750,9 43.69

218	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.03 .02.12.0 25	0003	Mesin Pompa air PMK	NN	BESI	Baik	APBN	31-12-2019					5	14,687,500 .00	5,875,000.00	0.00	5,875,000.00	3	8,812,5 00.00
219	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.03 .02.12.0 25	0001	Mesin Pompa air PMK	-	BESI	Baik	APBN	31-12-2019					5	14,687,500 .00	5,875,000.00	0.00	5,875,000.00	3	8,812,5 00.00
220	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.02.0 10	0002	Mesin Absen (Time Recorder)	Solution / X601	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2018					5	4,519,285. 72	2,711,571.43	0.00	2,711,571.43	2	1,807,7 14.29
221	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.06.0 21	0001	Camera Video	-	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2018					5	6,567,557. 42	3,940,534.45	0.00	3,940,534.45	2	2,627,0 22.97
222	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .02.03.0 03	0014	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2018					5	1,711,087. 76	1,026,652.66	0.00	1,026,652.66	2	684,435 .10
223	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.08 .03.05.0 24	0001	Rangka Penjepit	-	KAYU ULIN	Baik	APBN	31-12-2018					5	4,967,000. 00	2,980,200.00	0.00	2,980,200.00	2	1,986,8 00.00
224	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.04.0 04	0012	A.C. Split	-	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2019					5	6,250,000. 00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	3	3,750,0 00.00
225	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.02 .01.04.0 01	0001	Sepeda Motor	SPM- R2/SOL O	BESI	Baik	APBN	31-12-2005	MH8EN125A4 J-121888	F405-ID- 121641	DA 4073 R	D.479 0541. M	5	7,400,000. 00	7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	0	0.00
226	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.02 .01.04.0 01	0007	Sepeda Motor	SPM- R2/SOL O	BESI	Baik	APBN	31-12-2004	KEVAE- 1695033	MH1KEV A154K69 5840	DA 2461 R	C 93869 34 M	5	7,800,000. 00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0	0.00
227	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.02 .01.02.0 03	0003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	MB. PENUM PANG	BESI	Baik	APBN	31-12-2006	MHYESJ4106 J-098915	F10S-ID- 201530	DA 55 R	E.280 3870. M	7	112,500,00 0.00	112,500,000. 00	0.00	112,500,000. 00	0	0.00

228	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.02 .01.03.0 02	0002	Pick Up	MB. BEBAN	BESI	Baik	APBN	31-12-2007	MHCTBR54B 7K139680	E139680	DA 8731 R	R.002 2617. M	5	115,000.00 0.00	115,000,000. 00	0.00	115,000,000. 00	0	0.00
229	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.02 .01.03.0 02	0001	Pick Up	MB. BEBAN	BESI	Baik	APBN	31-12-2012	MHCTBR54B CK163764	E163764	DA 957 R	J.0492 0649. M	7	174,860,80 2.00	174,860,802. 00	0.00	174,860,802. 00	0	0.00
230	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .02.01.0 13	0001	Keyboard (Peralatan Mainframe)	Yamaha	plastik	Baik	APBN	31-12-2018					5	7,548,916. 59	4,529,349.95	0.00	4,529,349.95	2	3,019,5 66.64
231	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.02 .01.02.0 03	0005	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	MB. BEBAN	BESI	Baik	APBN	31-12-2015	MR0KS8CDX F1030594	2KD- S573768	DA 921 RB	L 10209 824 M	7	420,305,00 0.00	360,261,428. 57	0.00	360,261,428. 57	1	60,043, 571.43
232	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .02.03.0 03	0019	Printer (Peralatan Personal Komputer)	printer multifun gsi	plastik	Baik	APBN	31-12-2019					5	2,992,006. 52	1,196,802.61	0.00	1,196,802.61	3	1,795,2 03.91
233	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.02 .01.04.0 01	0003	Sepeda Motor	SOLO	BESI	Baik	APBN	31-12-2012	MH1JBE317C K182489	JBE3E11 79924	DA 2043 RB	0	5	13,154,975 .00	13,154,975.0 0	0.00	13,154,975.0 0	0	0.00
234	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.02 .01.01.0 03	0001	Station Wagon	MOBIL PENUMPANG	BESI	Baik	APBN	31-12-2016	MHFE2CJ2JG K054453	3SZDFW 1086	DA 1126 WT	L 11256 729 M	7	216,331,30 9.18	154,522,363. 70	0.00	154,522,363. 70	2	61,808, 945.48
235	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.04.0 04	0008	A.C. Split	-	ALUMINUM	Baik	APBN	31-12-2017					5	5,931,891. 89	4,745,513.51	0.00	4,745,513.51	1	1,186,3 78.38
236	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.03 .02.04.0 01	0001	Dongkrak Mekanik	NN	BESI	Baik	APBN	31-12-2014					5	2,800,000. 00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0	0.00
237	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.02 .01.04.0 01	0002	Sepeda Motor	SPM- R2/SOLO	BESI	Baik	APBN	31-12-2005	F405-ID- 121536	MH8EN1 25A4J- 122004	DA 4074 R	D.479 0544. M	5	7,400,000. 00	7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	0	0.00

238	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 03	0005	Note Book	acer	plastik	Baik	APBN	31-12-2011					5	3,500,000. 00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0	0.00
239	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.07.0 4	0002	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2pintu	kayu	Baik	APBN	31-12-2012					5	2,750,000. 00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0	0.00
240	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.07.0 4	0005	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	NN	KAYU	Baik	APBN	31-12-2013					5	1,750,000. 00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0	0.00
241	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.02 .01.04.0 01	0010	Sepeda Motor	SPM- R2/SOL O/NF 12AICF M/T	BESI	Baik	APBN	31-12-2014	MH1JBG113E K177680	JBG1E- 1177174	DA 2101 RB	L 02179 834 M	5	17,075,363 .00	17,075,363.0 0	0.00	17,075,363.0 0	0	0.00
242	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.01.0 02	0001	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	STAND ARD	BESI	Baik	APBN	31-12-2014					5	3,100,000. 00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0	0.00
243	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.04.0 01	0008	Lemari Besi/Metal	4 LACI	BESI/M ETAL	Baik	APBN	31-12-2014					5	2,750,000. 00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0	0.00
244	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.03.0 01	0001	Mesin Penghisap Debu/Vacu um Cleaner	NN	BESI	Baik	APBN	31-12-2014					5	1,500,000. 00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0	0.00
245	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.06.0 22	0001	Camera film	CANON	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2014					5	1,500,000. 00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0	0.00
246	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.01.0 05	0003	Meja Kerja Pejabat Eselon III	NN	KAYU	Baik	APBN	31-12-2014					5	2,264,100. 00	2,264,100.00	0.00	2,264,100.00	0	0.00
247	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.06 .03.47.0 02	0001	Genset	NN	BESI	Baik	APBN	31-12-2014					5	4,000,000. 00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0	0.00

248	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 01	0007	P.C Unit	PC	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2014					5	8,500,000. 00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0	0.00
249	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 01	0011	P.C Unit	NN	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2014					5	8,500,000. 00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0	0.00
250	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.02 .01.04.0 01	0015	Sepeda Motor	RD 2 SOLO/A FX12U2 1008 MT	BESI	Baik	APBN	31-12-2015	MH1JBP119F K324313	JBP1E- 1322238	DA 2011 R	L.0721 9574 M	5	17,122,000 .00	17,122,000.0 0	0.00	17,122,000.0 0	0	0.00
251	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .02.03.0 03	0018	Printer (Peralatan Personal Komputer)	MULTI FUNGSI	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2019					5	2,992,006. 52	1,196,802.61	0.00	1,196,802.61	3	1,795,2 03.91
252	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .02.03.0 03	0015	Printer (Peralatan Personal Komputer)	MULTI FUNGSI	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2019					5	2,992,006. 52	1,196,802.61	0.00	1,196,802.61	3	1,795,2 03.91
253	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 01	0029	P.C Unit	ACER / C22-320	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2019					5	7,918,239. 48	3,167,295.79	0.00	3,167,295.79	3	4,750,9 43.69
254	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.03 .02.12.0 25	0002	Mesin Pompa air PMK	-	BESI	Baik	APBN	31-12-2019					5	14,687,500 .00	5,875,000.00	0.00	5,875,000.00	3	8,812,5 00.00
255	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.04.0 04	0010	A.C. Split	SHARP / 1 PK	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2018					5	5,300,000. 00	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	2	2,120,0 00.00
256	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.06.0 02	0004	Televisi	LED TV	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2016					5	4,090,231. 79	4,090,231.79	0.00	4,090,231.79	0	0.00
257	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.09 .04.07.0 22	0001	Layar Proyektor	2x2 m	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2016					5	1,816,687. 27	1,816,687.27	0.00	1,816,687.27	0	0.00

258	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.04.0 04	0007	A.C. Split	-	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2017					5	5,931,891. 89	4,745,513.51	0.00	4,745,513.51	1	1,186,3 78.38
259	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.06 .01.01.0 48	0005	Uninterrupti ble Power Supply (UPS)	ICA / 600VA	BESI	Baik	APBN	31-12-2017					5	1,483,676. 47	1,186,941.18	0.00	1,186,941.18	1	296,735 .29
260	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .02.03.0 03	0015	Printer (Peralatan Personal Komputer)		PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2018					5	1,711,087. 76	1,026,652.66	0.00	1,026,652.66	2	684,435 .10
261	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .03.07.0 4	0004	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	KAYU	Baik	APBN	31-12-2014					5	4,000,000. 00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0	0.00
262	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 02	0002	Lap Top	-	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2014					5	12,400,000 .00	12,400,000.0 0	0.00	12,400,000.0 0	0	0.00
263	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .01.02.0 03	0007	Note Book	ASUS / ASUS X450 JN	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2015					5	12,400,000 .00	12,400,000.0 0	0.00	12,400,000.0 0	0	0.00
264	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.10 .02.03.0 03	0011	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON / MP 287 INJEK MULTI FUNGSI	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2015					5	1,700,000. 00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0	0.00
265	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .01.05.0 43	0001	LCD Projector/In focus	SONY / VPL- DX.142	PLASTI K	Baik	APBN	31-12-2016					5	10,042,243 .57	10,042,243.5 7	0.00	10,042,243.5 7	0	0.00
266	12.01. 63.72. 11050 2	1.3.2.05 .02.06.0 57	0015	Karpet	-	-	Baik	APBN	31-12-2017					5	1,200,000. 00	960,000.00	0.00	960,000.00	1	240,000 .00
Total															5,179,377, 389.85	4,846,303,32 9.98	0.00	4,846,303,32 9.98		333,074 ,059.87

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini menunjukkan tingkat caapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru berdasarkan sasaran / Target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Banjarbaru

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuh an	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	An gga ran	Re al i s a s i
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	789,716,000	716,194,300	985,073,541	1,179,591,500	1,392,725,000	709,206,000	831,997,900	931,704,575	990,925,200	1,225,587,276	1	1	1	1			
	Penyediaan jasa surat menyurat	1,500,000	1,650,000	1,950,000	3,183,000	3,000,000	1,500,000	1,630,500	1,950,000	3,183,000	2,490,000	1	1	1	1			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3,000,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,480,000	3,000,000	550,000	3,207,000	3,182,000	3,349,976	1	0	1	1			
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	55,250,000	60,699,650	60,702,500	69,000,000	72,450,000	54,938,000	58,044,150	56,346,700	10,900,000	72,450,000							
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3,600,000	3,900,000	4,200,000	6,000,000	6,800,000	3,600,000	3,900,000	4,200,000	6,000,000	6,000,000							
	Penyediaan alat tulis kantor	495,000	16,923,650	14,305,400	14,305,000	15,000,000	495,000	15,937,350	14,214,375	14,304,500	14,304,500							
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6,025,000	14,685,000	11,680,000	11,680,000	22,620,000	5,975,000	10,604,900	11,680,000	11,280,000	15,400,000							

	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	63,416,000	4,750,000	2,923,500	2,923,500	5,000,000	57,838,000	4,750,000	2,923,500	2,923,500	4,366,500						
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2,040,000	2,196,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,040,000	2,196,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000						
	Penyediaan makanan dan minuman	26,520,000	37,485,000	56,575,000	70,185,000	60,345,000	26,520,000	37,150,000	56,550,000	67,825,000	59,377,500						
	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60,320,000	66,205,000	135,337,141	150,815,000	178,840,000	45,825,000	58,485,000	133,758,000	144,152,200	137,428,800						
	Penyediaan Jasa Non PNS	567,550,000	504,400,000	691,100,000	845,200,000	1,022,190,000	507,475,000	638,750,000	643,875,000	724,175,000	907,420,000						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	244,217,450	328,511,950	333,563,300	258,672,000	340,778,377	207,247,350	314,618,950	266,850,350	238,800,250	261,983,798						
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	18,600,000	22,659,000	19,500,000	33,274,000	35,760,000	18,600,000	22,554,000	19,500,000	28,724,000	28,623,000						
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	33,492,500	47,811,000	66,244,000	109,273,000	175,179,000	33,490,400	45,673,000	61,493,850	95,894,250	122,428,155						
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2,000,000	2,000,000	3,100,000	5,750,000	5,750,000	1,775,000	2,000,000	3,100,000	4,400,000	4,200,000						
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4,300,000	4,300,000	5,800,000	7,500,000	14,860,000	3,400,000	4,300,000	5,800,000	7,500,000	6,950,643						
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1,250,000	1,300,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	950,000	1,300,000	1,500,000	1,050,000	582,000						
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	0	84,413,800	55,000,000	67,000,000	0	0	28,526,000	55,000,000	65,200,000						

	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0	0	5,750,000	46,375,000	40,729,377	0	0	5,750,000	46,232,000	34,000,000						
	Pemeliharaan gedung kantor	107,909,950	105,766,950	0	0	0	105,766,950	105,766,950	0	0	0						
	Pengadaan Peralatan Pengendalian Massa (DALMAS)	76,665,000	144,675,000	147,255,500	0	0	43,265,000	133,025,000	141,180,500	0	0						
3	Program Pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	453,003,300	573,492,000	883,467,150	885,517,850	1,140,068,850	442,007,100	468,176,500	838,900,200	876,532,550	1,123,245,350						
	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah	19,449,100	93,492,000	67,845,500	67,845,450	77,924,000	19,449,100	66,712,000	56,037,500	64,517,250	73,895,300						
	Pengamanan dan Pengawasan Pejabat Negara / Daerah	381,586,200	380,000,000	553,439,400	445,443,300	594,118,000	370,590,000	324,929,000	553,380,950	445,443,300	594,118,000						
	Patroli Lingkungan	51,968,000	100,000,000	159,699,000	159,699,000	183,877,000	51,968,000	76,535,500	137,324,500	159,654,000	183,877,000						
	Monitoring/Pengawasan Kegiatan Piket dan Pengamanan Pejabat Di Luar Kantor	0	0	102,483,250	102,483,250	115,433,000	0	0	92,157,250	101,487,450	104,733,200						
	Pendidikan dan Pelatihan Pendahuluan Bela Negara	0	0	0	18,046,950	18,046,950	0	0	0	15,648,750	17,121,950						
	Pemeliharaan, Ketentraman & Ketertiban Masyarakat Serta Pencegahan tindak Kriminal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Pengamanan dan Pengawasan Pejabat/Orang - Orang Penting	0	0	0	91,999,900	150,669,900	0	0	0	89,781,800	149,499,900						

4	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	57,620,000	97,020,000	319,301,300	428,301,100	418,453,210	57,620,000	95,040,000	210,336,300	420,201,799	361,860,810							
	Penegakan Perda, Keputusan Walikota dan Penertiban Perijinan	57,620,000	97,020,000	249,732,800	349,732,700	306,303,650	57,620,000	95,040,000	153,232,800	344,829,699	257,614,250							
	Sosialisasi dan Intelejensi Penegakan Perda	0	0	69,568,500	78,568,400	112,149,560	0	0	57,103,500	75,372,100	104,246,560							
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	44,607,000	40,000,000	50,000,000	59,999,900	89,997,500	41,627,000	32,864,000	45,443,500	50,762,700	74,847,000							
	Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	29,704,000	25,000,000	25,000,000	39,999,900	60,000,000	27,934,000	18,448,000	21,228,500	31,516,900	49,863,500							
	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	14,903,000	15,000,000	25,000,000	20,000,000	29,997,500	13,693,000	14,416,000	24,215,000	19,245,800	24,983,500							
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	140,405,000	28,000,000	39,673,800	1,064,970,000	355,691,550	109,780,000	16,800,000	23,508,800	224,460,200	200,114,350							
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	57,400,000	28,000,000	39,673,800	0	0	30,400,000	16,800,000	23,508,800	0	0							
	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	43,735,000	0	0	0	0	42,435,000	0	0	0	0							
	Pembinaan Rutin Secara Periodik Personil Satpol PP	12,733,000	0	0	0	0	10,408,000	0	0	0	0							
	Peningkatan Disiplin dan Koordinasi Serta Manajemen konflik	10,325,000	0	0	0	0	10,325,000	0	0	0	0							
	Pembinaan Teknik Komunikasi Kegiatan di Lapangan	16,212,000	0	0	0	0	16,212,000	0	0	0	0							
	Pendidikan Dasar Satpol PP	0	0	0	900,000,000	235,692,000	0	0	0	85,500,000	141,696,600							

	Pendidikan Fungsional Satpol PP	0	0	0	164,970,000	119,999,550	0	0	0	138,960,200	58,417,750						
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	0	141,920,000	174,527,000	0	0	0	141,500,000	171,611,000						
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	0	0	141,920,000	174,527,000	0	0	0	141,500,000	171,611,000						
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	0	0	0	770,952,400	497,647,000	0	0	0	424,812,600	315,909,400						
	Peningkatan Kemampuan Satuan Perlindungan Masyarakat	0	0	0	770,952,400	497,647,000	0	0	0	424,812,600	315,909,400						
9	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	0	0	0	139,704,600	123,872,100	0	0	0	6,592,900	22,388,500						
	Peningkatan Kesiagaan Penanggulangan Bencana	0	0	0	139,704,600	123,872,100	0	0	0	6,592,900	22,388,500						

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Banjarbaru

H.MARHAIN RAHMAN, S.Sos, M.AP
NIP. 19680716 199010 1

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi
Pamong Paja Kota Banjarbaru Periode Renstra 2021 -
2026

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
	- Rasio jumlah polisi pamong praja				7.39	7.44	7.51	7.58	7.65	5.91										
	Jumlah Personil Non PNS				63	93	100	110	120	53	75	63	66	67						
	cakupan Patroli Petugas satpol PP				84 kali	96 kali	108 kali	115 kali	122 kali	84 kali										
	Jumlah Patroli Gabungan & Pengawasan Lingkungan				84	96	108	115	122	84	126	110	114	120						
	- Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketemtraman, keindahan)				70.2%	72.8%	76.0%	79.2%	81.5%	100%	43%									
	Jumlah Rumdin & Balai Kota yang diamankan 24 jam				5	5	5	5	5	5	5									

	Peningkatan Response Pengaduan Masyarakat 1 x 24 jam				≤ 15 Menit	≤ 15 Menit	≤ 15 Menit	≤ 15 Menit	≤ 15 Menit	≤ 15 Menit	≤ 15 Menit	≤ 15 Menit	≤ 15 Menit	≤ 15 Menit					
	- Penegakan Perda				20.8%	23.9%	27.5%	35.8%	43.1%	42,1%	49%	106.6 %	172 %	280%					
	Jumlah Pengawasan, Peneguran dan Penindakan				195	210	225	225	250	126	120	240	387	433					

	- Jumlah demo				4	3	2	2	1	4	2	0	0	0					
	Presentase Standar Kelengkapan Personil Dalmas				40%	50%	60%	65%	70%	40%	50%	50%	50%	50%					
	- Persentase pelaksanaan kegiatan rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%					
	Jumlah Personil yang mengikuti Pelatihan Manajemen Aset				1	1	1	1	2	1	1	2	2	2					
	Presentase pemenuhan barang/jasa untuk administrasi kantor				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%					
	Jumlah Materai & Perangko yang terpakai (lembar)				300	300	300	300	300	300	300	300	300	300					
	Jumlah line telp yang terpasang				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	Jumlah Personil yang di cover asuransi				117	120	150	160	160	117	127	125	137	0					

	Jumlah petugas kebersihan kantor				1	2	2	2	2	1	1	1	1	1					
	Jumlah Barang ATK				14	14	14	14	14	14	14	14	14	51					
	Jumlah Jenis Barang yang di cetak				9	9	9	9	9	9	9	9	9	10					
	Jumlah jenis peralatan & perlengkapan yang di beli				25	25	25	25	25	25	16	25	25	29					
	Jumlah jenis bahan bacaan (koran) yang disediakan				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
	Jumlah Makan minum kantor (kali)				7560	7560	7560	7560	7560	7560	15120	7560	7560	11					

	Jumlah Rakor dan Konsultasi Keluar Daerah				36	36	36	36	36	27	18	36	36	266					
	Jumlah unit dinas transport personil				8	9	9	9	9	8	1								
	Jumlah Unit Mobil pejabat yang dipelihara				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	Jumlah Mobil Patroli yang dipelihara				1	2	2	3	3	1	1	3	3	11					
	Jumlah perlengkapan kantor yang diservice (buah)				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
	Jumlah peralatan kantor yang diservice (buah)				40	40	40	40	40	40	12	40	40	23					

	Jumlah Bangunan yang direhap				1	0	0	0	0	1	0	0	0	0					
	Jumlah mebeleur yang diperbaiki				10	10	20	20	20	10	2	20	20	3					
	Presentase Pelaporan Keuangan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%					
	Jumlah pencetakan pelaporan keuangan				175	175	175	175	175	175	75	175	6	6					
	- Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%					
	Jumlah Personil yang mengikuti Pelatihan Formal				7	7	8	10	10	7	3	0	0	0					
	Jumlah Jenis Pelatihan Nonformal				4	4	4	4	4	4	4	0	0	0					
	Jumlah Kegiatan Rutin Pembinaan Personil				22	30	40	40	40	22	0	0	0	0					
	JumlahKegiatan Pembinaan DisiplinPersonil (kali)				16	0	0	0	0	16	0	0	0	0					
	Jumlah Kegiatan Pembinaan Komunikasi Personil (kali)				15	0	0	0	0	15	0	0	0	0					

2.4 Tantangan dan peluang Satpol PP Kota Banjarbaru terhadap ketertiban.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan arus globalisasi merupakan bentuk gangguan, ancaman dan tantangan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam kerangka postur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ada beberapa permasalahan yang menjadi faktor yang mempengaruhi diantaranya sosial, budaya, hukum, politik dan ekonomi. Agar masalah-masalah tersebut tidak berpeluang menjadi pemicu konflik dan mengganggu ketertiban, maka perlu identifikasi intensif, sehingga tantangan tersebut bisa diminimalisir untuk menciptakan situasi yang kondusif di Kota Banjarbaru.

1. Tantangan

Tantangan (*Threats*) yaitu situasi dan faktor-faktor luar yang bersifat negative dan dapat mengakibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru tidak dapat atau gagal dalam mencapai visi dan misi, yaitu meliputi :

- a. Belum tercukupinya jumlah personel pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru dan personel di Kecamatan jika dibandingkan dengan luas wilayah
- b. Masih kurangnya partisipasi dan kesadaran sebagian masyarakat terhadap ketertiban
- c. Arus urbanisasi yang tinggi sehingga tidak bisa dihindarkan menimbulkan masalah social seperti gelandangan dan pengemis.
- d. Perlunya sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru
- e. Masih minimnya sosialisasi tentang Perda/Perwali
- f. Belum adanya lahan relokasi terhadap PKL yang berlokasi berpotensi melanggar PERDA
- g. Belum memiliki peta detail tata ruang Pelanggaran PERDA

2. Peluang

Peluang (***Opportunities***) yaitu situasi dan faktor- faktor luar bersifat positif yang membantu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi yang meliputi :

- a. Dukungan Kepala Daerah dan Legislatif dalam menangani permasalahan Pelanggaran dan Penegakkan PERDA/PERKADA
- b. Tersedianya anggaran yang memadai dalam usaha penegakan PERDA/PERKADA, Pengawasan Pejabat Negara dan Patroli Lingkungan dalam rangka memelihara Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan Masyarakat.
- c. Semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar masyarakat terhadap ketertiban.
- d. Adanya kesempatan mengikuti Diklat dan Pelatihan
- e. Adanya Sosialisasi Perda / Perkada.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas Menegakan Perda/Perkada, memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi, diantaranya :

1. Kurangnya jumlah personel Satpol PP
2. Kurang tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkungan Satpol PP yang mempunyai Kompetensi yang baik
3. Kurangnya Anggaran Operasional, sarana dan Prasarana yang tersedia untuk mendukung Kinerja Satpol PP
4. Masih kurangnya sarana dan Prasarana yang dapat mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Satpol PP
5. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkungan Satpol PP yang memahami Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
6. Masih kurangnya Jumlah personel Satpol PP

Adapun faktor-faktor yang memepengaruhi hal tersebut adalah :

- a. Masih terbatasnya SDM yang bisa dimutasikan ke Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru atau belum adanya penerimaan calon PNS khusus Satuan Polisi Pamong Praja dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru
- b. Belum memiliki ruang khusus penyimpanan barang bukti

- c. Belum Tersedianya Anggaran Daerah yang cukup untuk mendukung Kinerja SatpolPP
- d. Terbatasnya kesempatan mengikuti Pelatihan dan BinteK ke SatpolPP an
- e. Belum adanya penerimaan Personil anggota Satpolpp selama ini

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Walikota Banjarbaru sebagai perwujudan dari komitmen pembangunan kepala daerah tercantum dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021 – 2026 Visi dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1

VISI	POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN VISI
“BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA” (BANJARBARU JUARA)	MAJU	Cerminan dari komitmen yang dibangun untuk menjadikan Kota Banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi.
	AGAMIS	Di maknai bahwa masyarakat Kota Banjarbaru yang berakhlak mulia adalah salah satu syarat untuk memberikan landasan bagi tenwujudnya masyarakat yang agamis dan berbudi pekerti luhur pada tahun 2025

	SEJAHTERA	SDM yang berkualitas, menumbuhkembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis dan Pemerintah yang baik.
--	-----------	--

Kemudian misi dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Visi	Misi	Penjelasan Misi
“BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA” (BANJARBARU JUARA)	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia	Diwujudkan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui peningkatan kinerja pembangunan pendidikan, peningkatan kinerja pembangunan kesehatan dan pembangunan gender. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dilakukan dengan peningkatan kualitas kehidupan beragama yang mencakup sarana prasarana publik terkait peribadatan dan perhatian pemerintah daerah terhadap para pelaku pembinaan masyarakat baik organisasi masyarakat maupun pribadi masyarakat.
	Meningkatkan Pembangunan Perekonomian	Diwujudkan dengan kondisi masyarakat Kota Banjarbaru yang lebih maju dengan memanfaatkan

	<p>Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup</p>	<p>potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan.</p> <p>Upaya yang dilakukan dalam mencapai pembangunan ekonomi, termasuk dalam hal pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19, diantaranya adalah dengan pengembangan RT Mandiri, pertanian dan pariwisata, pengembangan sarana dan prasarana publik (Banjarbaru Corner), serta pengembangan kepemudaan dan olahraga. Sedangkan upaya dalam mencapai pembangunan wilayah berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur wilayah dan pelestarian lingkungan hidup.</p>
	<p>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah</p>	<p>Di wujudkan dengan pemerintahan yang demokratis, baik, dan bersih. Dalam periode 2021-2026 mendatang tata kelola pemerintahan yang amanah dilaksanakan dengan reformasi</p>

Visi misi tersebut di atas kemudian diterjemahkan secara spesifik dengan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru pada RPJMD 2021-2026, dapat kami gambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Misi 1	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berahlak Mulia
Tujuan	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Nilai Agama dan Budaya
Sasaran 5	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat Berdasarkan Budaya Lokal
Indikator Sasaran	Persentase Penyelesaian Konflik dan Kebencanaan
Strategi 5.2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Arah Kebijakan	1. Peningkatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2. Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Isu Stategis	Permasalahan secara umum pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut : a. Masih kurangnya koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan bencana b. Kurang tanggapnya masyarakat dan pihak terkait dalam koordinasi dan penanganan bencana

Program Pembangunan Daerah	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan 2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
----------------------------	--

3.3 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024, bidang urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat masuk kedalam Program Bina Administrasi Kewilayahan Dengan sasaran program yaitu meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar Negara; serta meningkatnya standardisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta pencegahan dan penganggulangan bencana dan bahaya kebakaran. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu:

- a. Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
- c. Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah;
- d. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat;
- e. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal);
- f. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Program tersebut dijabarkan ke dalam 6 Kegiatan, yaitu:

- a. Penyelenggaraan Hubungan Pusat Dan Daerah Serta Kerjasama .DaerahDengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah, melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan.
- b. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara .Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar yang dikembangkan.
- c. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat. Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- d. Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran.
- e. Penataaan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah Dan Toponimi. Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi.Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan. Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Rencana strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yang terkait dengan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat tersebut diatas dapat disimpulkan dengan matrik sebagai berikut :

Tabel 3.2

Matrik RenstraTarget Kinerja dan Kerangka PendanaanTahun
Anggaran 2021-2026 Komponen : Ditjen Bina Administrasi
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR
1239	PEMBINAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	<p>Peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah rumusan kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perlindungan Masyarakat, serta Hak Sipil dan HAM 2. Persentase fasilitasi pusat dan daerah Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Hak Sipil dan HAM 3. Jumlah daerah Kabupaten/Kota yang membentuk Kelembagaan SatpolPP sesuai peraturan perundang-undangan 4. Jumlah daerah

		<p>Kabupaten/kota yang mempunyai aparat Satpol PP/PPNS dan Satlinmas yang sesuai standar</p> <p>5. Jumlah daerah yang melaksanakan sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat</p> <p>6. Persentase daerah yang telah memfasilitasi 5P (penghormatan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan) hak asasi manusia serta fasilitasi konferensi internasional bagi aparat Satpol PP</p> <p>7. Inisiasi Gerakan Aparat Menuju Indonesia ramah (QW)</p>
--	--	---

	<p>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</p>	<p>Peningkatan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sosialisasi penanggulangan kebakaran 2. Jumlah relawan yang dibina 3. Data proteksi kebakaran 4. Jumlah pemadaman dan pengendalian kebakaran 5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi 6. Jumlah aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor Damkar 7. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam 8. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam
--	--	---

Tabel 3.3

Sasaran program dan kegiatan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET				
			2021	2022	2023	2024	2025
	PEMBINAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat					
		1. Jumlah rumusan kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perlindungan Masyarakat, serta Hak Sipil dan HAM	7 Rumusan	6 Rumusan	6 Rumusan	6 Rumusan	6 Rumusan
		2. Persentase fasilitasi pusat dan daerah Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Hak Sipil dan HAM	50 %	60 %	75 %	85 %	95 %

		3. Jumlah daerah Kabupaten/Kota yang membentuk Kelembagaan SatpolPP sesuai peraturan perundang - undangan	50 kab/kota	50 kab/kota	50 kab/kota	50 kab/kota	50 kab/kota
		4. Jumlah daerah Kabupaten/kota yang mempunyai aparat Satpol PP/PPNS dan Satlinmas yang sesuai standar	2.171 org	2.271 org	2.371 org	2.471 org	2.571 org
		5. Jumlah daerah yang melaksanakan sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	8 daerah	8 daerah	8 daerah	8 daerah	8 daerah
		6. Persentase daerah yang telah memfasilitasi 5P (penghormatan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan) hak asasi manusia serta fasilitasi konferensi internasional bagi aparat Satpol PP	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
		7. Inisiasi Gerakan Aparat Menuju Indonesia ramah (QW)	1 Buku	-	-	-	-
		Peningkatan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran					
		1. Jumlah sosialisasi penanggulangan kebakaran					
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	2. Jumlah relawan yang dibina					

KEBAKARAN	3. Data proteksi kebakaran					
	4. Jumlah pemadaman dan pengendalian kebakaran					
	5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi					
	6. Jumlah aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor Damkar					
	7. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam					
	8. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam					

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional. Rencana Tata Ruang Wilayah disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi dan berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur dan pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034. Adapun tujuan penataan ruang di Kota Banjarbaru adalah "Mewujudkan penataan ruang daerah yang indah, damai, nyaman dan dinamis sebagai kota yang terdepan dalam pelayanan dengan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan".

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 merupakan perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana Kawasan strategis.

A. Rencana Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung

kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur Ruang Wilayah Kota Banjarbaru meliputi struktur sistem pusat pelayanan kegiatan kota dan sistem jaringan prasarana wilayah kota.

1. Struktur sistem pusat pelayanan kegiatan kota

- a. Pusat Pelayanan Kota Banjarbaru berpusat di kawasan aglomerasi perkantoran Pemerintah Kota Banjarbaru dan Universitas Lambung Mangkurat yang meliputi Kelurahan Komet, Kelurahan Mentaos, dan Kelurahan Kemuning.
- b. Sub pusat pelayanan kota ditetapkan berdasarkan aglomerasi kegiatan kota, yaitu :
 - 1) Kegiatan perkantoran, Pendidikan, perdagangan yang berada di kota lama, yaitu di kecamatan Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan yang berpusat di Kelurahan Komet;
 - 2) Kegiatan transportasi, rintisan kegiatan perdagangan dan jasa, serta rintisan kegiatan industri di landasan Ulin dan Liang Anggang yang berpusat di Kelurahan Landasan Ulin Timur;
 - 3) Kegiatan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dan perwakilan pemerintah Pusat di Cempaka yang berpusat di Kelurahan Cempaka.
- c. Pusat lingkungan meliputi kawasan dengan fungsi perkantoran pemerintahan, perdagangan/jasa dengan skala lingkungan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum, serta perumahan yang tersebar di setiap kelurahan.

2. Sistem jaringan prasarana wilayah kota :

a. Sistem Prasarana Utama

1) Sistem Jaringan Jalan

- 2) Sistem Jaringan Kereta Api
- 3) Sistem Transportasi Udara
- b. Sistem Prasarana Lainnya
 - 1) Jaringan energi/kelistrikan
 - 2) Jaringan telekomunikasi
 - 3) Jaringan sumber daya air kota
 - 4) Infrastruktur perkotaan

B. Rencana Pola Ruang

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota. Adapun kawasan lindung di Kota Banjarbaru meliputi :

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan Ruang Terbuka Hijau;
- d. Kawasan Rawan Bencana.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kota Banjarbaru meliputi :

- a. Kawasan peruntukan permukiman;
- b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c. Kawasan peruntukan perkantoran;
- d. Kawasan peruntukan industri;
- e. Kawasan peruntukan pariwisata;
- f. Kawasan ruang terbuka non hijau;
- g. Ruang evakuasi bencana;
- h. Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- j. Kawasan peruntukan lainnya.

C. Rencana Kawasan Strategis

Kawasan strategis adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta pendayagunaan sumber alam dan teknologi. Adapun penetapan Kawasan strategis yang termasuk dalam wilayah Kota Banjarbaru meliputi :

1. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas :
 - a. Kawasan bandar udara, di Kecamatan Landasan Ulin;
 - b. Kawasan perdagangan dan jasa di kawasan perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di Kecamatan Cempaka;
 - c. Kawasan industri di Kecamatan Liang Anggang.
2. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial budaya terdiri atas :
 - a. Kawasan dengan nilai historis (*historical significance*) meliputi Makam Hasan Basri dan Makam Syuhada Haji;

- b. Kawasan pusat perkantoran pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kecamatan Cempaka.
- 3. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas :
 - a. Hutan lindung yang terletak di Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang yang berfungsi sebagai penyeimbang tata guna air;
 - b. Hutan kota yang terletak di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Cempaka.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 menyatakan bahwa Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Selanjutnya pada Pasal 14 dinyatakan bahwa KLHS merupakan Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Makna strategis KLHS utamanya karena kajian lingkungan hidup tersebut dilaksanakan pada tahap awal dari proses perencanaan pembangunan. Pada tahap awal proses pengambilan keputusan suatu kebijakan, rencana, dan program (KRP) terdapat berbagai alternatif yang belum tertutup oleh keputusan tertentu. Dengan demikian, sebuah studi dampak lingkungan hidup atas suatu kebijakan, rencana, dan program (KRP) pembangunan memberi kesempatan untuk mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam proses perencanaan pada tahap yang sangat awal sehingga dapat sepenuhnya memprakirakan dampak lingkungan hidup potensial, termasuk yang bersifat kumulatif jangka panjang dan sinergistik, baik pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun global.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan universal yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia. TPB merupakan kesepakatan pembangunan global yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser kearah pembangunan berkelanjutan yang mencakup bidang sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan tata kelola. Dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, TPB berperan sebagai tolak ukur perumusan kebijakan, rencana dan program yang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan perencanaan pembangunan di bawahnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017, Terdapat 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan untuk menjadi target bagi pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam pelaksanaan pembangunan. TPB memiliki indikator untuk masing-masing tujuannya sebagai instrumen penilaian terhadap pencapaian target dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Pencapaian target TPB yang dinilai melalui masing-masing indikatornya perlu diintegrasikan dalam perumusan kebijakan program kegiatan dengan cara menganalisis kesenjangan (gap) antara kondisi yang ada saat ini dengan target TPB yang relevan dan ingin dicapai oleh suatu daerah.

3.5 Penentuan Isu Isu Strategis

Isu-isu strategis Kota Banjarbaru mengacu kepada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 adalah urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Permasalahan secara umum pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan bencana
- b. Kurang tanggapnya masyarakat dan pihak terkait dalam koordinasi dan penanganan bencana

Isu – isu strategis Kota Banjarbaru tersebut kemudian diterjemahkan kedalam Isu isu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru masih adanya pelanggaran Perda atau Perkada. Adapun permasalahannya yang sering timbul, yaitu :

1. Covid- 19

Covid-19 merupakan pandemi global yang menyebar secara cepat ke seluruh dunia sehingga bukan hanya sektor transportasi serta sektor pariwisata saja yang terpengaruh melainkan merambat ke beberapa sektor lainnya seperti perdagangan, kesehatan dan lainnya, termasuk juga sektor perekonomian kota dan berpengaruh juga terhadap penerimaan daerah. Penerimaan daerah sendiri merupakan uang yang masuk ke kas daerah atau lebih tepatnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 17 ayat (1) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan. Dampak ini juga berpengaruh kepada kebijakan penyusunan renstra Satuan Polisi Pamong Praja, yang harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang dikurangi hingga 50%.

Disisi lain pandemi ini secara nasional menempatkan Satpol PP pada barisan terdepan dalam penanggulangan dan pengurangan dampak penyebarannya dengan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan penerapan protokol kesehatan.

Pelaksanaan tugas ini sangat menguras tenaga dan pikiran ditengah keterbatasan personel dan anggaran.

Pada sisi berikutnya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan dan pembatasan kegiatan masyarakat tidak

didukung dengan perda dan perkara yang komprehensif, yang mengakibatkan tindakan tegas tidak bisa serta merta dilaksanakan.

2. Usaha Jenis Hiburan Umum

Saat ini jenis usaha hiburan umum berupa kafe-kafe tumbuh sangat pesat, kondisi ini tentu saja memerlukan perhatian yang sangat serius dari Satpol PP apabila dikaitkan dengan pelanggaran perizinan dan penegakan pajak hiburan.

3. Bangunan Tanpa IMB

Isu lainnya yang tidak kalah penting adalah banyak ditemukannya bangunan tanpa IMB berdasarkan rilis data Dinas Perumahan dan Pemukiman. Isu ini juga akan menjadi perhatian Satpol PP untuk dilakukan penanganan, dengan kendala ketentuan tentang garis sempadan bangunan (GSB) dan Peraturan Walikota Nomor 22 tahun 2012 Tentang Ketentuan Teknis Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Wilayah Kota Banjarbaru, telah dicabut. Kondisi ini mengakibatkan kekosongan hukum yang mengatur tentang GSB, yang kemudian diganti dengan penerapan Perda Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014 – 2034. Masalah kemudian muncul karena perda tata ruang tidak mengatur sanksi pidana.

4. Kawasan Rawan Pedagang Kaki Lima

Kota Banjarbaru merupakan tempat yang cukup menjanjikan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) adapun tempat-tempat PKL yang selama ini menjadi tempat favorit yaitu, Jl.MistarCokrokusumo, Jl.A.Yani Km 33, Jl. Panglima Batur, Km21 dan Lianganggang. Pola penanganan selama ini yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dengan melakukan patroli rutin dimana ada PKL ditempat tersebut langsung kita berikan pembinaan dan sanksi tegas, termasuk sanksi kita bawa kepengadilan untuk di sidangkan, namun untuk semua itu tidak juga membuat para PKL jera. Perda yang mengatur PKL yang terbaru yaitu Nomor 6 Tahun 2014 sanksi Pidana 6 bulan kurungan dan

denda Rp. 50.000.000,-, itupun belum membuat efek jera bagi PKL yang menempatkan dagangannya tidak sesuai peraturan.

Diharapkan melalui Renstra 2021 -2026 Pemerintah Kota Banjarbaru agar dapat memberikan solusi tentang PKL yang makin tumbuh subur dan dapat menyediakan tempat bagi PKL itu sendiri, sehingga keberadaannya dapat tertata dan terkelola dengan baik dan tidak terkesan kumuh.

5. Aktivitas Prostitusi

Prostitusi di Kota Banjarbaru Satpol PP Banjarbaru bekerja sama dengan Instansi terkait seperti Kesbang Pol, Koramil dan Kepolisian melakukan upaya budaya malu masuk Pembatuan.

Satpol PP Kota Banjarbaru juga sering melakukan rajia Pekerja Sex Komersil (PSK) hingga disidangkan di Pengadilan, namun itu semua tidak membuat efek jera bagi PSK maupun *Germonya*, namun kenyataannya sampai saat ini makin bertambah penghuninya, belum lagi penyakit HIV & AIDS yang di derita PSK apabila ini dibiarkan dan tidak segera dicarikan solusi untuk penutupan tempat tersebut tidak menutup kemungkinan penduduk non Banjarbaru lambat laun akan tertular juga dengan penyakit tersebut yang hingga kini belum ada obatnya.

Kedepan melalui Rencana Strategis Satpol PP Kota Banjarbaru diharapkan dapat menangani penyakit social seperti PSK dapat tertangani dengan baik sehingga tidak ada lagi PSK yang ada di Kota Banjarbaru.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru beserta indikator kinerjanya disajikan dalam sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Program	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Toleransi Beragama, Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Tibum dan Tranmas	80%	80%	80%	80%	90%
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda /Perkada	70%	70%	70%	70%	70%
	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran yang terselesaikan	80%	80%	85%	90%	90%
		Persentase Pelayanan dan Penyelamatan Bencana Non Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Lima Tahun Mendatang, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Agamis dan Berakhlak Mulia			
Misi 1 : Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia			
Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya toleransi beragama, Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah
			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
			Peningkatan Kapsitas SDM Satuan Polisi Pamong

			Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraaan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/Wali kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Kota
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota
		Pembinaan Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS)	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Kabupaten/ Kota
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah/Kota

		Daerah Kabupaten/Kota	
		Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
		Pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru Periode Tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN PROGRAM (SASARAN)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA AWAL PERENCANAAN A.N.	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR RENSTRA		UNT KERJA/PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB	LOKASI		
					2020	TARGET	2021	2022	TARGET	2023	2024	2025	2026	TARGET	2027	2028	TARGET	2029	2030			TARGET	2031
									Rp					Rp					Rp				
MENINGKATKAN TOLERANSI BERAGAMA, KEAMANAN, KEMAMPUAN, KESADARAN HUKUM DAN TERTIB MASYARAKAT	PERSENTASE PEMBINAAN KEAGAMAAN, PENYELISIAN POTENSI KONFLIK SARA DAN PELANGGARAN PERDA		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah																			
				Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	80%	7,077,125,019	80%	7,859,415,326	90%	7,965,165,699	90%	8,081,491,108	90%	8,209,449,059	90%	8,350,202,805	90%	8,404,943,987	KASAT			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	100%	21,660,000	100%	23,826,000.00	100%	26,208,600	100%	28,829,460	100%	31,712,406	100%	34,883,647	100%	34,883,647				
				Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender																			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang disusun sesuai ketentuan																			
				Jumlah dokumen perencanaan yang menggunakan analisis gender	2 dokumen	2 dok	4,842,250	2 dok	5,326,475	2 dok	5,859,123	2 dok	6,445,035	2 dok	7,089,538	2 dok	7,798,492	2 dok	7,798,492				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang disusun sesuai ketentuan	3 Dokumen	3 dok	16,817,750	3 dok	19,340,412.50	3 dok	21,274,453.75	3 dok	23,401,899	3 dok	25,742,089	3 dok	28,316,298	3 dok	28,316,298				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	6,210,899,750	100%	6,831,989,725	100%	6,834,997,538	100%	6,838,306,131	100%	6,841,945,584	100%	6,845,948,983	100%	6,845,948,983				
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	100%	12 bulan	6,183,556,000	89 orang	6,801,911,600	89 orang	6,801,911,600	89 orang	6,801,911,600	89 orang	6,801,911,600	89 orang	6,801,911,600	89 orang	6,801,911,600				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan	2 Dokumen	2 dok	13,672,000	2 Laporan	14,929,200.00	2 Laporan	16,422,120.00	2 Laporan	18,064,332	2 Laporan	19,870,765	2 Laporan	21,857,842	2 Laporan	21,857,842	Kasubag Keuangan			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan	9 Dokumen	9 dok	13,771,750	9 Laporan	15,148,925	9 Laporan	16,663,818	9 Laporan	18,330,199.25	9 Laporan	20,163,219	9 Laporan	22,179,541.09	9 Laporan	22,179,541.09				
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengimplementasikan hasil bimtek dan diklatnya	100%	100%	246,200,000	100%	285,556,000	100%	314,105,000	100%	345,515,500	100%	380,067,050	100%	418,073,755	100%	418,073,755				
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai	144 Steel	140 Steel	140,000,000	172 Steel	154,000,000	174Steel	169,400,000	174 Steel	186,340,000	174 Steel	204,974,000	174 Steel	225,471,400	174 Steel	225,471,400	Kasubag Umum Dan Kepegawaian			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang telah mengikuti Bimtek	-	7 Orang	94,200,000	7 Peserta	117,750,000	7 Peserta	129,525,000	8 peserta	142,477,500	12 peserta	156,725,250	14 peserta	172,397,775	14 peserta	172,397,775				
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat	2 Orang	2 Orang	12,000,000	2 peserta	13,800,000	2 peserta	15,180,000	2 peserta	16,698,000	2 peserta	18,367,800	2 peserta	20,204,580	2 peserta	20,204,580	Seksi pelatihan dasar			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	100%	197,014,440	100%	216,715,884.00	100%	238,387,472.40	100%	262,226,219.64	100%	288,448,841.60	100%	317,293,725.76	100%	317,293,725.76				
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	19 Jenis	19 Jenis	9,494,690	19 Jenis	10,444,159.00	19 Jenis	11,488,574.90	19 Jenis	12,637,432.39	19 Jenis	13,901,175.63	19 Jenis	15,291,293.19	19 Jenis	15,291,293.19				
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	162,724,500	16 jenis	178,996,950	16 jenis	196,896,645	16 jenis	216,586,310	16 jenis	238,244,940	16 jenis	262,069,434	16 jenis	262,069,434	Kasubag Umum Dan Kepegawaian			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia	11 Jenis	11 Jenis	9,836,250	11 Jenis	10,818,775	11 Jenis	11,900,652.50	11 Jenis	13,090,718	11 Jenis	14,399,789.53	11 Jenis	15,839,768	11 Jenis	15,839,768				

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia	3 Jenis	12 Bulan	3,600,000	4 buku	3,960,000	4 buku	4,356,000	4 buku	4,791,600	4 buku	5,270,760	4 buku	5,797,836	4 buku	5,797,836	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	11,360,000	1 Laporan	12,496,000	3 Laporan	24,992,000	4 Laporan	27,491,200	5 Laporan	30,240,320	6 Laporan	33,264,352	6Laporan	33,264,352	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat digunakan	0	100%	11,500,000	100%	13,800,000	100%	15,180,000	100%	16,698,000	100%	18,367,800	100%	20,204,580	100%	20,204,580	
	Pegadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	-	8 Jenis	11,500,000	8 Jenis	13,800,000	8 Jenis	15,180,000	8 Jenis	16,698,000	8 Jenis	18,367,800	8 Jenis	20,204,580	8 Jenis	20,204,580	Kasubag Umum Dan Kepegawain
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	100%	100%	103,312,800	100%	113,644,080	100%	125,008,488	100%	137,509,337	100%	151,260,270	100%	166,386,298	100%	166,386,298	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dapat digunakan	12 Bulan	12 Bulan	86,512,800	12 Bulan	95,164,080	12 Bulan	104,680,488	12 Bulan	115,148,537	12 Bulan	126,663,390	12 Bulan	139,329,730	12 Bulan	139,329,730	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor lainnya	2 Orang	2 orang	16,800,000	2 orang	18,480,000	2 orang	20,328,000	2 orang	22,360,800	2 orang	24,596,880	2 orang	27,056,568	2 orang	27,056,568	Kasubag Umum Dan Kepegawain
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	286,538,029	100%	373,889,637.00	100%	411,278,600.70	100%	452,406,460.77	100%	497,647,106.85	100%	547,411,817.53	100%	602,152,999.28	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Perorangan/Jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	1 Unit	1 Unit	32,000,000	1 Unit	36,800,000.00	1 Unit	40,480,000.00	1 Unit	44,528,000.00	1 Unit	48,980,800.00	1 Unit	53,878,880.00	1 Unit	53,878,880.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	19 Unit	19 Unit	207,919,000	19 Unit	239,108,850.00	19 Unit	263,017,535.00	19 Unit	289,319,288.50	19 Unit	318,251,217.35	19 Unit	350,076,339.09	19 Unit	350,076,339.09	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		6 Jenis	13,572,000	6 Jenis	14,929,200.00	6 Jenis	16,422,120.00	6 Jenis	18,064,332.00	6 Jenis	19,870,765.20	6 Jenis	21,857,841.72	6 Jenis	21,857,841.72	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	100%	100%	23,297,029	1 paket	69,891,087.00	1 paket	76,880,195.70	1 paket	84,568,215.27	1 paket	93,025,036.80	1 paket	102,327,540.48	1 paket	102,327,540.48	
	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara	100%	6 Jenis	9,750,000	1 Paket	13,162,500.00	1 Paket	14,478,750.00	1 Paket	15,926,625.00	1 Paket	17,519,287.50	1 Paket	19,271,216.25	1 Paket	19,271,216.25	Kasubag Umum Dan Kepegawain
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Tibum dan Transmas	100%	80%	2,098,460,000	80%	2,603,868,000	80%	2,830,254,800	80%	3,067,780,280	80%	3,323,558,308	90%	3,619,914,139	90%	3,619,914,139	
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda Dan Perkada	70%	70%	422,807,000	70%	505,972,050	70%	573,750,058	70%	638,132,986	70%	702,730,396	70%	775,220,164	70%	775,220,164	KASAT
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Tibum dan Transmas yang ditindaklanjuti	100%	100%	2,098,460,000	100%	2,603,868,000	100%	2,830,254,800	100%	3,067,780,280	100%	3,323,558,308	100%	3,619,914,139	100%	3,619,914,139	KABID TIBUM
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	Jumlah patroli peredaran kawasan gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	15 Lokasi	18 Lokasi	1,078,680,000	4 Kawasan	1,402,284,000	8	1,542,512,400	12	1,696,763,640	16	1,866,440,004	20	2,053,084,004	24	2,053,084,004	
		Jumlah pengamanan dan pengawasan pejabat				60 Kali		60 Kali		60 Kali		60 Kali		60 Kali		60 Kali		
		Jumlah aset yang diamankan				5 Tempat		5 Tempat		5 Tempat		5 Tempat		5 Tempat		5 Tempat		
	Perindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Persentase Perindakan atas gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	0	150,000,000	100%	165,000,000	100%	171,500,000	100%	178,650,000	100%	186,515,000	100%	195,166,500	100%	195,166,500	Kasi OPSDAL
		Jumlah perindakan atas pelanggaran perda dan perkada	0	0	100,000,000	250 Kegiatan	100,000,000	250 Kegiatan	100,000,000	250 Kegiatan	100,000,000	250 Kegiatan	100,000,000	250 Kegiatan	100,000,000	250 Kegiatan	100,000,000	
		Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	0	0	50,000,000	100%	65,000,000	100%	71,500,000	100%	78,650,000	100%	86,515,000	100%	95,166,500	100%	95,166,500	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			89,800,000		130,560,000		142,116,000		154,827,600		168,810,360		189,191,396		189,191,396	KABID LINMAS
		Jumlah Safinmas yang terlatih dan dikuatkan	4800 Orang	20	85,600,000	20	115,560,000	20	127,116,000	20	139,827,600	20	153,810,360	20	169,191,396	20	169,191,396	Kasi LINMAS
		Jumlah pelatihan dan Kegiatan Bidang Anggota Safinmas mendukung Pemeliharaan Tibum & Transmas	120	40	4,200,000	120	15,000,000	120	15,000,000	120	15,000,000	120	15,000,000	120	20,000,000	120	20,000,000	Kasi LINMAS
		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		100	6,500,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	35,000,000	100	35,000,000	KABID LINMAS
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan dan Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	0	0	-	120	15,000,000	120	15,000,000	120	15,000,000	120	15,000,000	120	20,000,000	120	20,000,000	KASI BINA POTENSI

SATPOL PP

Dari tabel tersebut di atas, pencapaian program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru diukur menggunakan parameter dengan uraian sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	RUMUS CAPAIAN
Persentase Penyelesaian Gangguan Tibum dan Tranmas	Jumlah pengaduan yang ditangani dibagi jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk dikali 100
Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda Dan Perkada	Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakan dibagi jumlah keseluruhan perda dan perkada yang memuat sanksi dikali 100
Persentase Gangguan Tibum dan Tranmas yang ditindaklanjuti	Jumlah gangguan tibum yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah gangguan tibum yang dilaporkan dikali 100
Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Dihitung dari terlaksananya pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan
Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	Dihitung dari terlaksananya penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban	Dihitung dari tersedianya dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan

umum	masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyerlenggranaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Dihitung dari tersedianya dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Dihitung dari terlaksananya peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Dihitung dari terlaksananya kerja sama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan kejahatan dalam Teknik pencegahan kejahatan
Persentase pelanggaran perda dan perwali yang ditindaklanjuti	Jumlah tindaklanjut pelanggaran dibagi jumlah laporan pelanggaran perda dikali 100
Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	Dihitung dari Terlaksananya sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota
Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap keparuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Dihitung dari Terlaksananya pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali kota

Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	Dihitung dari Terlaksananya penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota sesuai SOP
Jumlah laporan hasil melaksanakan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan perda dan perkara	Dihitung dari terlaksananya pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan perda
Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran Yang terselesaikan	Jumlah layanan pemadaman ,penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah +Jumlah layanan pemadaman kebakaran di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah di bagi jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota dikali 100
Persentase Pelayanan dan Penyelamatan Bencana Non Kebakaran Yang Terselesaikan	Jumlah pelayanan dan penyelamatan bencana non kebakaran yang diselesaikan dibagi jumlah pelayanan yang

	dilaporkan dikali 100
Persentase Penanganan Bencana Kebakaran Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	Jumlah penanganan bencana kebakaran yang ditindak lanjuti sesuai ketentuan dan tepat waktu dibagi jumlah penanganan yang dilaporkan dikali 100
Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan yang dilaksanakan dibagi jumlah kasus yang dilaporkan dikali 100
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dihitung dari tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan	Dihitung dari tersedianya dokumen yang memuat SKKL pada desa/kelurahan yang telah tersedia dukungan sarana dan prasarana
Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Dihitung dari tersedianya laporan hasil penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia

BAB VII

KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Pada Bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru yang mengacu Pada tujuan dan sasaran RPJMD, Indikator Kinerja ditampilkan dalam tabel berikut :

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir	RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Indeks kepuasan pelayanan internal	80%	80%	90%	90%	90%	90%	90%
	Nilai Evaluasi AKIP	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB
	Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
	Terselesaikan nya dokumen perencanaan tepat waktu	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok
	Indeks kepuasan pelayanan internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
	Jumlah pelaporan keuangan tepat waktu	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2Dok	2Dok
	Jumlah laporan inventaris barang tepat waktu Kesesuaian BMD Satpol PP dengan neraca aset	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok
	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya pakaian dinas pegawai	140 Steel	172 Steel	174 Steel	174 Steel	174 Steel	174 Steel	174 Steel
	Jumlah Personil Satpol PP yang mengikuti pelatihan dasar, bimtek dan diklat	5 Orang	7 Orang	7 Orang	8 Orang	12 Orang	14 Orang	14 Orang
	Jumlah personil yang mengikuti Bimtek PPNS	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang
	Indeks kepuasan pelayanan internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	19 Jenis	19 Jenis	19 Jenis	19 Jenis	19 Jenis	19 Jenis	19 Jenis
	Tersedianya alat tulis kantor, materai dan benda pos lainnya dan makan minum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	11 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	11 Jenis
	Tersedianya bahan bacaan	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis

	dan peraturan perundang-undangan							
	Tersedianya iuran APEKSI/ADEKSI/ASDEKSI/AKKOPSI/CITY NET tersedianya biaya perjalanan dinas, tersedianya kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
	Tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis
	Indeks kepuasan pelayanan internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah langganan rekening telepon, air, listrik, faxsimile dan internet terbayar	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
	Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang
	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terpeliharanya mobil jabatan dalam kondisi baik	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit

	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit
	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis
	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis
	Persentase Penyelesaian Gangguan Tibum dan Tranmas	80%	80%	80%	80%	80%	90%	90%
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda Dan Perkada	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
	Persentase Gangguan Tibum dan Tranmas yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah patroli pensterilan kawasan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	18 Lokasi	4 Kawasan	8 Kawasan	12 Kawasan	16 Kawasan	20 Kawasan	24 Kawasan
	Jumlah pengamanan dan pengawalan pejabat		60 Kali	60 Kali	60 Kali	60 Kali	60 Kali	60 Kali
	Jumlah aset yang diamankan		5 Tempat	5 Tempat	5 Tempat	5 Tempat	5 Tempat	5 Tempat
	Persentase Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	250 Keg	-	-	-	-	-

Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Pemberdayaan n Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang
Jumlah Kegiatan Bidang dan Anggota Satlinmas mendukung Pemeliharaan Tibum & Tranmas	84 Keg	120 Keg	120 Keg	120 Keg	120 Keg	120 Keg	120 Keg	120 Keg
Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	0	120 Keg	120 Keg	120 Keg	120 Keg	120 Keg	120 Keg	120 Keg

	Jumlah Pelatihan Petugas Kamanan Lingkungan	2	2	2	2	2	2	2
	Persentase Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Pengawasan disiplin Anggota Satpol PP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan & Keterampilan Anggota Satpol PP	51 Orang	51 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	51 Orang	50 Orang
	Jumlah Kegiatan Pengawasan disiplin pelaksanaan tugas Anggota Satpol PP dan Linmas	120 Keg	120 Keg	120 Keg	120 Keg	120 Keg	120 Keg	120 Keg
	Jumlah kegiatan tim terpadu penyelenggaraan tibun dan tranmas	12 Keg	12 Keg	12 Keg	12 Keg	12 Keg	12 Keg	12 Keg
	Persentase pelanggaran perda dan perkara yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Perda dan Perkada yang disosialisasikan	4 Perda	4 Perda	4 Perda	4 Perda	4 Perda	4 Perda	4 Perda

Jumlah kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan perkada	180 Keg	180 Keg	180 Keg	180 Keg	180 Keg	180 Keg	180 Keg	180 Keg
Jumlah penindakan atas pelanggaran perda dan perkada	250 Tindakan	150 Tindakan	150 Tindakan	150 Tindakan	160 Tindakan	170 Tindakan	170 Tindakan	170 Tindakan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan PPNS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Gelar Perkara	2 Orang	122	122	122	122	122	122	122
Terlaksananya Diklat & Bimtek PPNS		2	2	2	2	2	2	2
Persentase Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamongpraja								
Jumlah Kegiatan Rapat Pembinaan Jabatan Fungsional		60	60	60	60	60	60	60
Jumlah Kegiatan Lapangan Pembinaan Jabatan Fungsional		120	120	120	120	120	120	120

	Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran Yang Terselesaikan	80%	80 %	80 %	85%	90%	90%	90%
	Persentase Pelayanan dan Penyelamatan Bencana Non Kebakaran Yang Terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penanganan Bencana Kebakaran Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pemadaman dan Pengendalian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Kebakaran							
	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Kegiatan pendataan dan pemeliharaan hydran kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Kegiatan pendataan dan pemeliharaan hydran kebakaran	60 Kegiatan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	60 Kegiatan
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Kepada Relawan Damkar dan Masyarakat Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Kepada Relawan Damkar dan Masyarakat Umum	24 Keg	24 Keg	24 Keg	24 Keg	24 Keg	24 Keg	24 Keg
	Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

	Terlaksananya Diklat Aparatur Pemadam Kebakaran	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 ini berisi penjabaran Program dan kegiatan yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dan, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, dan RPJM Nasional.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru merupakan dokumen perencanaan yang otentik sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam lima tahun mendatang yang harus ditaati oleh seluruh unsur dan personel lingkup Satpol PP. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait bagaimana melaksanakan Renstra, baik dalam tahapan normal maupun pada masa transisi agar Renstra ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Satpol PP kolaborasinya dengan SKPD dan instansi terkait, *serta menjadi pedoman dalam pencapaian kinerja.*

Banjarbaru, 07 September 2021

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Banjarbaru**



H. MARHAIN RAHMAN, S.Sos, M.AP
NIP. 19680716 199010 1 001